



RENJA TAHUN 2024



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MERANGIN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T., karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (KUKMPP) Kabupaten Merangin Tahun 2024 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Renja ini, selain bertujuan untuk menginformasikan tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin tahun 2024, sekaligus juga menjadi acuan bagi seluruh staf Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin. Kami menyadari Renja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga dengan diterbitkannya dokumen Renja ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang memerlukannya.

Bangko, 23 Juni 2023

PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MERANGIN



MUHAMMAD AMIR TAMSIL, SH. ME

Pembina Tk. I

NIP. 19630405 198403 1 003

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 5 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 8 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN | 12 |
| LALU..... | |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan | 12 |
| Capaian Renstra Perangkat Daerah..... | |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 22 |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat | 25 |
| Daerah..... | |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 28 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 47 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... | 63 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... | 63 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... | 66 |
| 3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan..... | 69 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | 87 |
| 4.1 Indikator Kinerja..... | 87 |
| 4.2 Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif dan Sumber Dana..... | 87 |
| BAB V PENUTUP..... | 105 |
| 5.1 Catatan Penting..... | 105 |
| 5.2 Kaidah Pelaksanaan..... | 105 |
| 5.3 Rencana Tindak Lanjut..... | 105 |

BAB I

PENDAHULUAN

Renja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekaligus merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Pemerintah Daerah yang lebih dikenal dengan RPJMD. Penjabaran RPJMD harus dilakukan oleh OPD dalam bentuk Renstra yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator yang harus dicapai. Untuk menyusun dan mencapai target tersebut maka dibuat Renja sebagai landasan perencanaan kerja tahunan.

1.1 Latar Belakang

Mengupayakan terwujudnya *good governance* dan *clean governance*, merupakan bentuk ikhtiar pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karenanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Berangkat dari hal tersebut diatas, maka Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin diwajibkan menyusun Renja yang berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dengan tersusunnya Renja ini, diharapkan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus berimplikasi pada peningkatan perekonomian daerah.

1.1.1 Pengertian Renja

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang berisikan garis-garis besar program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijadikan sebagai

landasan penyusunan perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap OPD untuk menyusun Renja sebagai landasan penyusunan kerja selama periode satu tahun yang berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan (Renstra OPD) yang dituangkan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sesuai Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas KUKMPP memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian serta Tugas Pembantuan.

Selanjutnya, agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas KUKMPP Kabupaten dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, maka Renja menjadi hal yang mutlak harus disusun, sebagai pedoman pelaksanaan tugas tahun 2023.

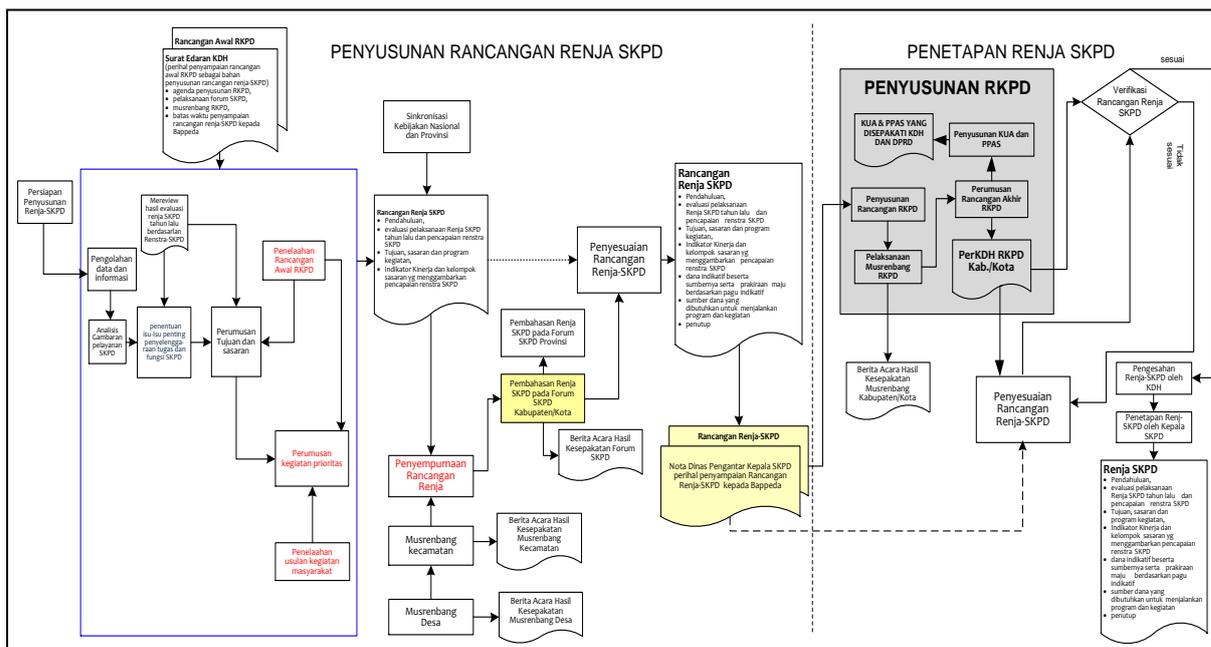
1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD adalah kerangka dasar berupa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi materi rancangan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.

3. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan, target keluaran kegiatan, dan total dana yang diperlukan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi yang berisi rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan awal dalam penyusunan RKA pendahuluan OPD.



Gambar 1.1 Bagan Alur Renja Dinas KUKMPP Kab. Merangin

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

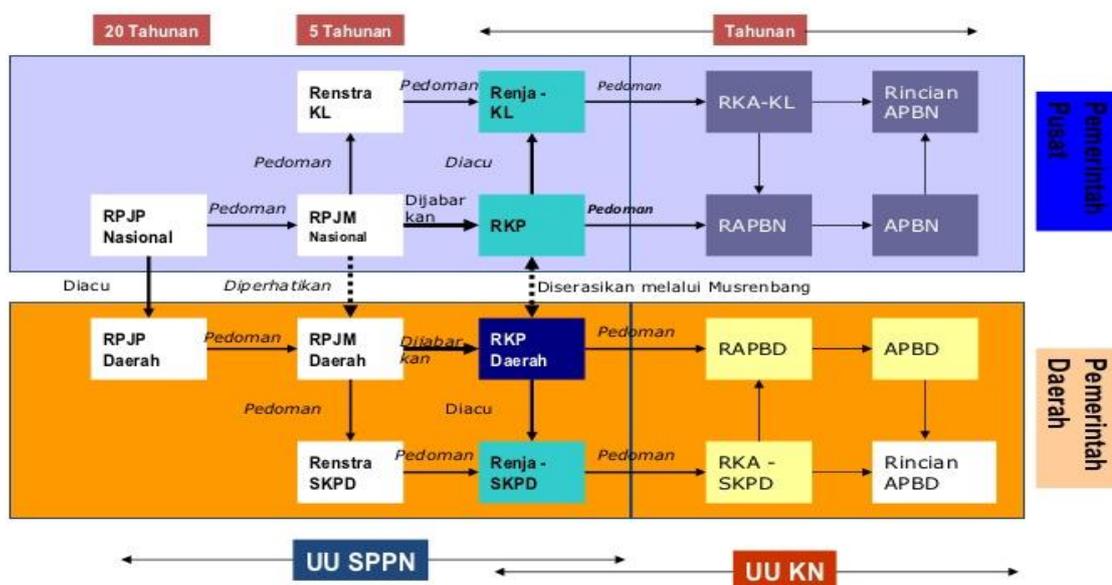
1. Persiapan Penyusunan Renja
 - a. Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - b. Orientasi mengenai Renja
 - c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - d. Pengumpulan Data dan Informasi
2. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan Renja.

3. Tahap Perumusan Rancangan Renja

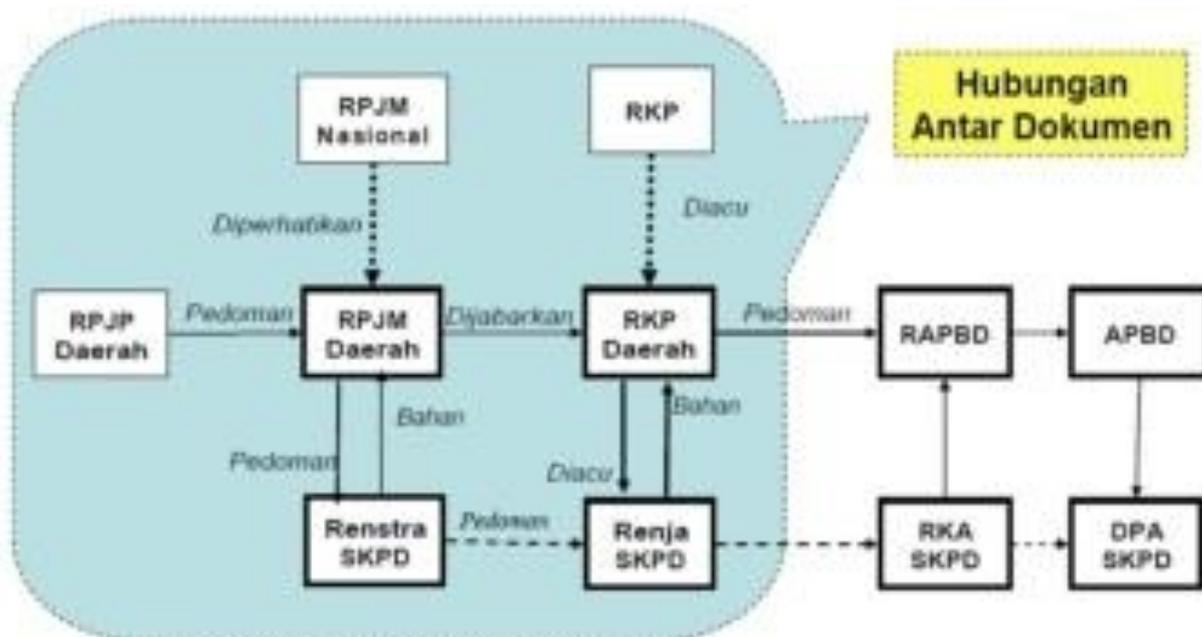
- a. Pengolahan data dan informasi
- b. Analisis gambaran pelayanan OPD
- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- e. Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- f. Perumusan tujuan dan sasaran
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
- h. Perumusan kegiatan prioritas
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
- j. Penyempurnaan rancangan kerja OPD
- k. Pembahasan forum OPD dan
- l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah
- m. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- n. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- o. Penetapan Renja.

Alur Perencanaan dan Penganggaran



1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Renja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup perangkat daerah adalah penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu. Oleh karenanya, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
17. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
18. Peraturan Bupati Merangin Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal Kabupaten Merangin;
19. Peraturan Bupati Merangin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin;
20. Peraturan Bupati Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 4).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin tahun 2024 dimaksudkan sebagai kerangka dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024, sedangkan tujuannya adalah :

1. Acuan bagi Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Merangin tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Merangin.
2. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin
3. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin selama tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas KUKMPP, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindaklanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang pemuatan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan,

selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Sejauh mana tingkat kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian Mengenai :

- Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan.
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, Misalnya: terdapat rumusan program, kegiatan dan

sub kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan awal RKPD, baik jenis program, kegiatan, sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- Rencana program, kegiatan dan sub Kegiatan

BAB IV RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang Indikator Kinerja, Kelompok sasaran serta lokasi kegiatan dan kebutuhan dana indikator Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin tahun lalu atau tahun 2022 adalah perencanaan tahunan yang merupakan turunan dari Renstra OPD tahun 2018-2023. Dikarenakan Renstra merupakan siklus lima tahunan, perlu dilakukan evaluasi secara periodik sekurang-kurangnya satu tahun sekali melalui evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan Renja.

Serangkaian evaluasi terhadap Renja dan membandingkannya dengan target pencapaian yang ditetapkan dalam Renstra merupakan wujud pertanggungjawaban dari OPD atas pelaksanaan program dan kegiatan atau yang biasa disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Sedangkan tingkat capaian program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan selanjutnya disajikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seyogya evaluasi Renja menampilkan capaian program dan kegiatan tahun n-3, n-2, perkiraan capaian n-1 capaian dan perbandingan antara capaian sampai dengan tahun n-1 terhadap target Renstra.

Dikarenakan pada tahun 2020 dilakukan perubahan Renstra guna menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta beserta beberapa Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka evaluasi program dan kegiatan hanya disajikan untuk tahun 2022 saja. Hal ini disebabkan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator serta target kinerja yang jauh berbeda dengan sebelum perubahan Renstra. Demikian pula halnya dengan target tahun akhir periode Renstra 2018-2023 juga sudah disesuaikan sesuai hasil penjumlahan tahun 2019 dan 2020 saja. Evaluasi yang menyajikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 atau sesuai perubahan Renstra, baru dapat disajikan pada Renja tahun 2023 mendatang.

Secara rinci evaluasi atas pelaksanaan Renja tahun lalu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra
Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin Sampai Dengan Tahun 2022

| Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 | |
|---|---|--|---|--|---------------------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja SKPD tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 98% | 94% | 94% | 100% | 96% | 99,48% |
| | | NILAI EVALUASI AKIP DINAS KUKMPP | BB | B | B | 100% | 90% | 90% |
| | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | 95% | | | | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% | 8 Dokumen | 66,67% |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 4 Dokumen | 66,67% |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 6 Dokumen | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 200% | 4 Dokumen | 66,67% |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 21 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100% | 14 Dokumen | 66,67% |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | |
| 6 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1.404 Orang/Bulan | 468 Orang/Bulan | 468 Orang/Bulan | 100% | 468 Orang/Bulan | 66,67% |
| 7 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan | 36 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | 24 Dokumen | 66,67% |

| Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 | |
|---|---|--|---|--|---------------------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja SKPD tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
| | | Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| 8 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 2 Laporan | 66,67% |
| 9 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 2 Laporan | 66,67% |
| Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar | | | | | | |
| 10 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 100% | 8 Laporan | 66,67% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | |
| 11 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 2 Paket | 66,67% |
| 12 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 2 Paket | 66,67% |
| 13 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 2 Paket | 66,67% |
| 15 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 90 Laporan | 30 Laporan | 30 Laporan | 100% | 60 Laporan | 66,67% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 | |
|----|---|--|------------|--|---------------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja SKPD tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah | | | | | | |
| 16 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 1 Paket | 50% |
| 17 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | 6 Unit | 6 Unit | 50% | 6 Unit | 50% |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | |
| 18 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 36 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 24 Laporan | 66,67% |
| 19 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 24 Laporan | 66,67% |
| 20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 36 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 24 Laporan | 66,67% |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | |
| 21 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 56 Unit | 13 Unit | 13 Unit | 100% | 13 Unit | 46,43% |
| II | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Koperasi Bersertifikat NIK | 17% | 15% | 21,5% | 143,11% | 21,5% | 126,47% |
| | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang | Persentase Koperasi RAT | 20% | 17% | 19,08% | 112,24% | 19,08% | 95,4% |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 | |
|---|--|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja SKPD tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
| | Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | |
| 1 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Unit | 10 Unit | 10 Unit | 100% | 40% | 40% |
| III | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | PERSENTASE KSP/USP-KOPERASI BERPREDIKAT SEHAT | 7% | 4% | 3,29% | 82,25% | 4% | 57,14% |
| | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kepatuhan KSP/USP-Koperasi | 11% | 9% | 6,7% | 74,44% | 6,7% | 60,91% |
| 1 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 60 Unit usaha | 60 Unit usaha | 17 Unit usaha | 28,33% | 35 Unit usaha | 58,33% |
| IV | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | PERTUMBUHAN UNIT USAHA UMKM | 3,3% | 1,5% | 1,97% | 131,33% | 2,9% | 87,88% |
| | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase UMKM yang dibina | 6% | 5% | 5,27% | 107,4% | 5,27% | 87,83% |
| 1 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 640 Unit usaha | 200 Unit usaha | 250 Unit usaha | 125% | 450 Unit usaha | 70,31% |
| V | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | PERSENTASE KETERSEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 70% | 67% | 41,52% | 61,97% | 41,52% | 59,31% |

| Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 | |
|---|--|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja SKPD tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
| | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Bangunan Pasar Dalam Kondisi Baik | 60% | 55% | 25% | 45,45% | 25% | 41,67% |
| 1 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 7 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 100% | 3 Unit | 42,85% |
| | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Persentase Pasar di Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan Yang Pengelolaannya Baik | 12% | 8% | 8% | 100% | 8% | 66,67% |
| 2 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 36 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | 24 Dokumen | 66,67% |
| VI | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | RATA-RATA KENAIKAN HARGA BARANG POKOK | ≤ 5% | ≤ 5% | 6,41% | 71,8% | 6,41% | 71,8% |
| | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah jenis barang kebutuhan barang pokok dan barang penting yang dikendalikan harga dan stoknya | 11 Jenis | 11 Jenis | 9 Jenis | 81,82% | 9 Jenis | 81,82% |
| 1 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 36 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 24 Laporan | 66,67% |
| VII | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | PERSENTASE WAJIB TERA TERTIB UKUR | 12% | 8% | 8,33% | 104,12% | 8,33% | 69,42% |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Persentase Pasar Rakyat di Ibu Kota Kabupaten dan di Ibu Kota Kecamatan Tertib Ukur | 48% | 48% | 20% | 41,67% | 20% | 41,67% |
| 1 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 4200 Unit | 1000 Unit | 875 Unit | 87,5% | 875 Unit | 54,52% |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 | |
|---|--|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja SKPD tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
| VIII | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | PERTUMBUHAN WIRUSAHA BARU | 4,5% | 1,5% | 1,49% | 99,33% | 3,69% | 82% |
| | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Persentase Calon Wirausaha Binaan Yang Tumbuh Menjadi Wirausaha Baru | 54% | 50% | 46,92% | 93,84% | 46,92% | 86,89% |
| | 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 9 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% | 6 Dokumen | 66,67% |
| IX | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | PERSENTASE IKM PANGAN YANG MEMILIKI SERTIFIKASI (HKI/BPOM/PIIRT/HALAL) | 13% | 12% | 10% | 83% | 10% | 76,92% |
| | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase IKM Penghasil Produk Unggulan Yang Difasilitasi Sertifikasinya | 10% | 8% | 7,3% | 91,25% | 7,3% | 73% |
| | 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan | 30 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100% | 20 Dokumen | 66,67% |

| Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 | |
|---|--|--|---|--|---------------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja SKPD tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
| X | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | PERSENTASI USAHA INDUSTRI YANG MASUK KEDALAM SIINas | 2% | 1% | 0,26% | 26% | 0,5% | 50% |
| | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase informasi usaha industri yang disusun secara lengkap | 5% | 2% | 1,5% | 75% | 3,5% | 70% |
| 1 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 100% |

Dari keseluruhan program dan kegiatan yang tercantum pada tabel diatas, hanya akan dijelaskan program kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin.

Secara umum, dari tujuh program yang dilaksanakan pada tahun 2021, hanya tiga program yang capaiannya melebihi target, sedangkan lima program lainnya tidak mencapai target.

a. Program Dengan Capaian Melebihi Target

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Sesuai tabel 2.1 diatas, tingkat capaian Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi diukur dengan indikator persentase koperasi bersertifikat NIK, dengan target tahun 2022 sebesar 15%, terealisasi sebesar 21,5%, sehingga capaian kinerja sebesar 143,33%.

Tingginya capaian kinerja untuk persentase koperasi bersertifikat NIK, dikarenakan kebijakan Dinas KUKMPP menonaktifkan sebanyak 199 unit koperasi tidak aktif dan tidak lagi dimasukkan dalam perhitungan persentase koperasi bersertifikat NIK.

2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)

Capaian program ini diukur dengan indikator pertumbuhan unit usaha UMKM, target tahun 2022 sebesar 1,5%, berhasil direalisasikan 1,97%, sehingga capaian kinerja 131,33%

3. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program standardisasi dan perlindungan konsumen diukur dengan indikator persentase wajib tera tertib ukur, target tahun 2022 sebesar 8%, berhasil direalisasikan sebesar 8,33%, sehingga capaian kinerja 104,12%

b. Program Dengan Capaian Sesuai Target

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan, dengan target tahun 2022 sebesar 94%, dan berhasil dicapai 100%

c. Program Dengan Capaian Dibawah Target

1. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi diukur dengan indikator persentase ksp/usp-koperasi berpredikat sehat, target tahun 2022 sebesar 4%, berhasil direalisasikan sebesar 3,29%, sehingga capaian kinerja 82,25%

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan diukur dengan indikator persentase ketersediaan sarana distribusi perdagangan, target tahun 2022 sebesar 67%, berhasil direalisasikan sebesar 41,25, sehingga capaian kinerja 61,97%

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Stabilisasi harga diukur dengan indikator rata-rata kenaikan harga barang pokok, tahun 2022 ditargetkan kenaikan harga tidak lebih dari 5%, realisasi kenaikan sebesar 6,41%, sehingga capaian kinerja adalah 71,8%

4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program perencanaan dan pembangunan industri diukur dengan indikator pertumbuhan wirausaha baru, target tahun 2022 sebesar 1,5%, berhasil direalisasikan sebesar 1,49%, sehingga capaian kinerja 99,33%

5. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program pengendalian izin usaha industri diukur dengan indikator persentase ikm pangan yang memiliki sertifikasi (HKI/BPOM/PPIRT/Halal) dengan target tahun 2022 sebesar 12%, berhasil direalisasikan sebesar 10%, sehingga capaian kinerja 83%.

6. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program pengelolaan sistem informasi industri nasional diukur dengan indikator persentasi usaha industri yang masuk kedalam SIINas, target tahun 2022 sebesar 1%, berhasil direalisasikan sebesar 0,26%, sehingga capaian kinerja 26%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan OPD ditujukan untuk mengetahui sejauh mana capaian target sasaran strategis sampai dengan tahun berjalan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin, ada lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sekaligus menjadi indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Menurut Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022

| No | Indikator | Target Renstra Perangkat Daerah | Realisasi | | Catatan Analisis |
|----|---------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|---|
| | | | Capaian | Persentase Capaian | |
| 1 | Persentase koperasi berkualitas | 13% | 11,84% | 91,08% | <p>Koperasi berkualitas sekurang-kurangnya memiliki ciri sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktifitas koperasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan sekurang-kurangnya dengan pelaksanaan RAT rutin setiap tahun, manajemen koperasi berlangsung dengan baik, dan pelaporan koperasi disampaikan secara rutin dan baik pula. - Adanya kesadaran kolektif dari anggota tentang pentingnya koperasi yang dibuktikan dengan keaktifan pengurus, pengawas dan anggota. - Volume usaha mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. - Keberadaan koperasi mampu mendatangkan kesejahteraan bagi anggotanya yang dibuktikan dengan peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) <p>Pada tahun 2022, mayoritas koperasi yang ada masih sangat lemah pada aspek kelembagaan, yang dibuktikan dengan masih rendahnya persentase koperasi yang melaksanakan RAT. Demikian pula halnya, volume usaha dan SHU juga tidak mengalami peningkatan yang berarti. Dengan target yang cukup rendah, juga belum bisa tercapai.</p> |
| 2 | Persentase UMKM naik kelas | 0,06% | 0,05% | 83,33% | <p>Tidak tercapainya target kinerja untuk UMKM naik kelas, dikarenakan perubahan regulasi tentang UMKM. Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Usaha Mikro, kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan paling banyak Rp. 50.000.000 atau penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 b. Usaha Kecil, kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 atau penjualan tahunan diatas Rp. 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 c. Usaha Menengah, kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan diatas Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000 atau penjualan tahunan diatas Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 |

| | | | | | |
|---|---|------|---------|---------|--|
| | | | | | <p>Sedangkan Pearturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021, sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan kriteria UMKM sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Usaha Mikro, kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 atau penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.000.000.000 Usaha Kecil, kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan diatas Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000 atau penjualan tahunan diatas Rp. 2.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000 Usaha Menengah, kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan diatas Rp. 5.000.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000 atau penjualan tahunan diatas Rp. 15.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 <p>Dengan perubahan regulasi ini, hampir seluruh UMKM di Kabupaten Merangin masuk dalam kategori usaha mikro.</p> |
| 3 | Pertumbuhan nilai perdagangan | 7% | 7,53% | 107,57% | Tahun 2022, nilai perdagangan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yakni 7,53%. Angka ini naik sangat signifikan dibanding tahun 2021 yang tumbuh sebesar 5,63%. |
| 4 | Rata-Rata Selisih Harga Bahan Pokok Tingkat Pasar Rakyat Terhadap Harga Acuan | ≤5% | (5,13%) | 102,6% | Sepanjang tahun 2022, upaya harga-harga bahan pokok berhasil dijaga dengan sangat baik. Untuk komoditi yang sama, harga pada tingkat pasar rakyat secara keseluruhan masih sedikit dibawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah pusat. |
| 5 | Pertumbuhan produksi IKM | 4,2% | 2,31% | 55% | Secara umum, produksi IKM tidak tumbuh sesuai harapan, dari target 4,2% hanya berhasil direalisasikan sebesar 2,31%. Kondisi ini tidak terlepas dari masih rendahnya daya saing produk IKM lokal, sehingga kalah dengan produk yang sama dari luar daerah. |

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penjelasan mengenai isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah diuraikan menurut urusan sebagai berikut :

a. Isu-Isu Penting

1) Urusan Koperasi dan UKM

- a) Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi yang ditandai dengan banyaknya koperasi tidak aktif dan tidak melaksanakan RAT sesuai ketentuan perundang-undangan
- b) Keberadaan koperasi belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya.
- c) Rendahnya kualitas produk UKM, sehingga belum mampu bersaing dengan produk sejenis yang berasal dari luar daerah.
- d) Rendahnya produktifitas koperasi dan UKM.

2) Urusan Perdagangan

- a) Minimnya pemasaran produk dan komoditi unggulan daerah
- b) Masih rendahnya ketersediaan sarana perdagangan berupa bangunan pasar rakyat.
- c) Masih rendahnya kualitas pengelolaan pasar rakyat
- d) Masih rendahnya pengawasan terhadap sistem distribusi barang penting seperti gas elpiji 3 kg bersubsidi
- e) Minimnya sistem informasi perdagangan
- f) Minimnya pengawasan distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi.

3) Urusan Perindustrian

- a) Masih rendahnya kualitas dan kemasan produk unggulan Merangin.
- b) Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku IKM penghasil produk unggulan Merangin
- c) Mayoritas produk IKM belum memiliki sertifikasi seperti sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Sertifikat Halal, Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-PPIRT) dan Izin Edar BPOM dan lain-lain yang menyebabkan rendahnya daya saing produk di pasaran.

b. Permasalahan dan Hambatan

Meski pada setiap urusan pemerintah terdapat isu penting yang harus ditindaklanjuti, namun beberapa permasalahan sekaligus menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas KUKMPP patut menjadi catatan khusus sebagai berikut :

1) Minimnya dukungan alokasi anggaran

Meskipun Dinas KUKMPP melaksanakan tiga urusan pemerintahan sekaligus, namun pada kenyataannya belum mendapatkan dukungan alokasi anggaran yang memadai. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

2) Kurangnya penguasaan bidang tugas aparatur pelaksana kegiatan

Mayoritas aparatur pelaksana kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas KUKMPP belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur.

c. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin tahun 2018-2023 adalah, “Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian dan Pariwisata”. Salah satu fokus yang hendak dicapai melalui visi ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Merangin.

Dari ketiga urusan yang menjadi kewenangan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin, semuanya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Terlebih sektor perdagangan dan perindustrian yang menjadi elemen perhitungan PDRB.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 ekonomi Kabupaten Merangin mengalami pertumbuhan sebesar 5,72%. Dari angka pertumbuhan tersebut, dirunut menurut sektor lapangan kerja, maka diperoleh angka pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 7,53% dan sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 4,39%. Khusus untuk sektor industri pengolahan mengalami pelambatan dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 5,88%, dan pada tahun 2022 hanya sebesar 4,39% atau turun sebesar 1,49%.

Kondisi tersebut diatas menegaskan bahwa pencapaian sasaran strategis Dinas KUKMPP pada urusan Perdagangan dan Perindustrian berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

d. Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk memulihkan kembali sektor Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian, dibutuhkan terobosan yang lebih efektif dan efisien. Terobosan dimaksud haruslah mampu menjawab tantangan atas kondisi yang ada.

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, sebagian besar produk UKM di Kabupaten Merangin belum mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, apalagi untuk ekspansi usaha keluar daerah. Kondisi tersebut setidaknya dipicu oleh beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya kualitas produk UMKM
- 2) Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku UMKM
- 3) Masih rendahnya kemampuan akses pasar produk UMKM
- 4) Rata-rata produk UMKM belum memenuhi standard barang yang ditetapkan oleh calon mitra.

Pemerintah pusat telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan memulihkan dunia usaha melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, salah satunya mendorong semua Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan produk dalam negeri, dan lokal. Diantara kebijakan yang digaungkan oleh pemerintah pusat, diantaranya adalah mendorong produk lokal agar segera masuk kedalam e-katalog elektronik

Sejalan dengan kewenangan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin, kondisi sebagaimana telah diuraikan diatas, merupakan tantangan yang sangat serius sekaligus merupakan peluang sangat baik untuk yang harus ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023. Terlebih upaya peningkatan daya saing, dimulai dari peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha, peningkatan kualitas produk dan peningkatan pemasaran produk mutlak harus mendapat porsi lebih.

e. Rekomendasi dan Catatan Strategis

Dari beberapa isu penting, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta tantangan dan peluang diatas, maka dapat diformulasikan beberapa rekomendasi dan catatan strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui peningkatan kapasitas SDM pengurus dan pengawas serta meningkatkan pengawasan terhadap operasional koperasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Meningkatkan daya saing UKM melalui peningkatan kapsitas SDM pelaku usaha, peningkatan kualitas produk dan memperluas jejaring pemasaran.
- 3) Meningkatkan aktifitas ekonomi sektor perdagangan melalui peningkatan ketersediaan sarana distribusi, peningkatan pengenalan terhadap produk dan komoditi unggulan daerah.
- 4) Meningkatkan pengawasan perdagangan, terutama terhadap ketersediaan stok dan harga barang pokok, barang penting serta barang bersubsidi.
- 5) Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah, terutama komoditi dan produk yang menjadi icon Kabupaten Merangin melalui peningkatan kualitas kemasan.
- 6) Meningkatkan keamanan produk industri guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat, melalui fasilitasi pengurusan sertifikasi produk berupa Label Halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-PIRT) dan yang sejenis lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD bertujuan untuk membandingkan rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan OPD. Dikarenakan proses penyusunan RPKD dan Renja OPD berjalan secara simultan, maka pada saat penyusunan Renja OPD perlu dilakukan reuiu terhadap rancangan awal RKPD. Table dibawah ini memperlihatkan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------------|------------------------|---------|--------------------------|--|--|---------------------|------------------------|--------|----------------|-----------------|--|
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Catatan Penting | |
| | | | | Volume | Satuan | | | | | Volume | Satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | NON URUSAN | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 5.230.000.000,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | 96,5 % | | 5.230.000.000 | | |
| | | | | | | | | NILAI EVALUASI AKIP DINAS KUKMPP | | BB | | | | |
| 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan | | 94,5 | % | 68.000.000,00 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | | 94,5 % | | 68.000.000 | | |
| 2.17.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kantor Dinas KUKMPP | 2 | Dokumen | 35.000.000,00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kantor Dinas KUKMPP | 2 Dokumen | | 35.000.000 | | |
| 2.17.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 2 | Dokumen | 9.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 2 Dokumen | | 9.000.000 | | |
| 2.17.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | Kantor Dinas KUKMPP | 2 | Dokumen | 9.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | Kantor Dinas KUKMPP | 2 Dokumen | | 9.000.000 | | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | |
|---------------------|---|--|---------------------|------------------------|-------------|------------------|---|--|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Targert Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Catatan Penting |
| | | | | Volume | Satuan | | | | | Volume | Satuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | | | Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | | |
| 2.17.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 3 | Laporan | 7.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 3 | Laporan | 7.000.000 | |
| 2.17.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kantor Dinas KUKMPP | 4 | Laporan | 8.000.000,00 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kantor Dinas KUKMPP | 4 | Laporan | 8.000.000 | |
| 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan | | 92,5 | % | 4.014.000.000,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 92,5 % | | 4.014.000.000 | |
| 2.17.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kantor Dinas KUKMPP | 518 | Orang/Bulan | 3.850.000.000,00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kantor Dinas KUKMPP | 518 | Orang/Bulan | 3.850.000.000 | |
| 2.17.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 12 | Dokumen | 150.000.000,00 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 12 | Dokumen | 150.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | |
|---------------------|--|---|---------------------|------------------------|---------|----------------|--|---|---------------------|-------------------------|---------|----------------|-----------------|
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Targert Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Catatan Penting |
| | | | | Volume | Satuan | | | | | Volume | Satuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.17.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 1 | Laporan | 7.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 1 | Laporan | 7.000.000 | |
| 2.17.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 1 | Laporan | 7.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 1 | Laporan | 7.000.000 | |
| 2.17.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Pencatatan Barang | | 95,5 | % | 7.000.000,00 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar | | 95,5% | | 7.000.000 | |
| 2.17.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 4 | Laporan | 7.000.000,00 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 4 | Laporan | 7.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------------|------------------------|--------|----------------|--|--|---------------------|------------------------|--------|----------------|-----------------|
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Catatan Penting |
| | | | | Volume | Satuan | | | | | Volume | Satuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 95,5 | % | 195.000.000,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 95,5% | | 195.000.000 | |
| 2.17.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Kantor Dinas KUKMPP | 114 | Paket | 125.000.000,00 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Kantor Dinas KUKMPP | 114 Paket | | 125.000.000 | |
| 2.17.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Menyesuaikan | 5 | Orang | 70.000.000,00 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kantor Dinas KUKMPP | 5 Orang | | 70.000.000 | |
| 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 95,5 | % | 324.000.000,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 95,5 % | | 324.000.000 | |
| 2.17.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 1 | Paket | 13.000.000,00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 1 Paket | | 13.000.000 | |
| 2.17.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 1 | Paket | 48.000.000,00 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 1 Paket | | 48.000.000 | |
| 2.17.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan | Kantor Dinas KUKMPP | 1 | Paket | 13.000.000,00 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 1 Paket | | 13.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | |
|---------------------|---|---|---------------------|------------------------|---------|----------------|---|---|---------------------|------------------------|--------|----------------|-----------------|
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Catatan Penting |
| | | | | Volume | Satuan | | | | | Volume | Satuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | yang Disediakan | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Menyesuaikan | 60 | Laporan | 250.000.000,00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Menyesuaikan | 60 Laporan | | 250.000.000 | |
| 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 77 | % | 155.000.000,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah | | 77% | | 155.000.000 | |
| 2.17.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 1 | Unit | 0,00 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 1 Unit | | 0,00 | |
| 2.17.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 1 | Unit | 0,00 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 1 Unit | | 0,00 | |
| 2.17.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 30 | Unit | 50.000.000,00 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 30 Unit | | 50.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------------|------------------------|----------|-----------------------|--|--|---------------------|-------------------------|--------|--------------------|-----------------|
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Targert Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Catatan Penting |
| | | | | Volume | Satuan | | | | | Volume | Satuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.17.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 4 | Unit | 80.000.000,00 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 4 Unit | | 80.000.000 | |
| 2.17.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 3 | Unit | 25.000.000,00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 3 Unit | | 25.000.000 | |
| 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 91 | % | 307.000.000,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 91% | | 307.000.000 | |
| 2.17.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kantor Dinas KUKMPP | 12 | Laporan | 2.000.000,00 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kantor Dinas KUKMPP | 12 Laporan | | 2.000.000 | |
| 2.17.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 12 | Laporan | 145.000.000,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 12 Laporan | | 145.000.000,00 | |
| 2.17.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | Kantor Dinas KUKMPP | 12 | Laporan | 160.000.000,00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 12 Laporan | | 160.000.000,00 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | |
|---------------------|---|--|---------------------|------------------------|--------|----------------|---|--|---------------------|-------------------------|--------|----------------|-----------------|
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Targert Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Catatan Penting |
| | | | | Volume | Satuan | | | | | Volume | Satuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | Umum Kantor yang Disediakan | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 62 | % | 160.000.000,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 62 % | | 160.000.000,00 | |
| 2.17.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kantor Dinas KUKMPP | 20 | Unit | 150.000.000,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kantor Dinas KUKMPP | 20 Unit | | 150.000.000,00 | |
| 2.17.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kantor Dinas KUKMPP | 15 | Unit | 10.000.000,00 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kantor Dinas KUKMPP | 15 Unit | | 10.000.000,00 | |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | PERSENTASE KOPERASI BERSERTIFIKAT NIK | | 22 | % | 100.000.000,00 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | PERSENTASE KOPERASI BERSERTIFIKAT NIK | | 22 | % | 100.000.000,00 | |
| 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Koperasi RAT | | 22 | % | 100.000.000,00 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Koperasi RAT | | 22 | % | 100.000.000,00 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | |
|---------------------|---|---|--------------------|------------------------|------------|----------------|---|--|--------------------|-------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Targert Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Catatan Penting |
| | | | | Volume | Satuan | | | | | Volume | Satuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.17.03.2.01.01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Merangin | 50 | Unit Usaha | 100.000.000,00 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | Kabupaten Merangin | 60 | Unit Usaha | 100.000.000,00 | |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | PERSENTASE KSP/USP-KOPERASI BERPREDIKAT SEHAT | | 5 | % | 70.000.000,00 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | PERSENTASE KSP/USP-KOPERASI BERPREDIKAT SEHAT | | 5 | % | 70.000.000,00 | |
| 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kepatuhan KSP/USP-Koperasi | | 13 | % | 70.000.000,00 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kepatuhan KSP/USP-Koperasi | | 13 | % | 70.000.000,00 | |
| 2.17.04.2.01.01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | Kabupaten Merangin | 30 | Unit Usaha | 70.000.000,00 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | Kabupaten Merangin | 60 | Unit Usaha | 70.000.000,00 | |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | PERSENTASE PENGURUS MEMILIKI PEMAHAMAN BAIK DALAM | | 17 | % | 100.000.000,00 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | PERSENTASE PENGURUS MEMILIKI PEMAHAMAN BAIK DALAM MANAJEMEN KOPERASI | | 17 | % | 100.000.000,00 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | |
|---------------------|---|--|---------------------|------------------------|------------|----------------|---|--|-------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Catatan Penting |
| | | | | Volume | Satuan | | | | | Volume | Satuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | MANAJEMEN KOPERASI | | | | | | | | | | | |
| 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rata-Rata Tingkat Pemahaman Peserta Terhadap Materi Pelatihan Koperasi | | 75 | % | 100.000.000,00 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rata-Rata Tingkat Pemahaman Peserta Terhadap Materi Pelatihan Koperasi | | 75 | % | 100.000.000,00 | |
| 2.17.05.2.01.01 | Peningkatan, Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | Kantor Dinas KUKMPP | 30 | Orang | 100.000.000,00 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | Kec. Bangko | 90 | Orang | 100.000.000,00 | |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | <i>Pertumbuhan modal koperasi</i> | | 1.50 | % | 100.000.000,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | <i>Pertumbuhan modal koperasi</i> | | 1.50 | % | 100.000.000,00 | |
| 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase koperasi yang memanfaatkan fasilitas permodalan/pembiayaan pemerintah (KUR/LPDB)</i> | | 30 | % | 100.000.000,00 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase koperasi yang memanfaatkan fasilitas permodalan/pembiayaan pemerintah (KUR/LPDB)</i> | | 30 | % | 100.000.000,00 | |
| 2.17.06.2.01.01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses | <i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah,</i> | Kantor Dinas KUKMPP | 20 | Unit Usaha | 100.000.000,00 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, | <i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan,</i> | | 20 | Unit Usaha | 100.000.000,00 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | |
|---------------------|--|--|--------|------------------------|--------|----------------|--|---|--------|-------------------------|--------|----------------|-----------------|
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Targert Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Catatan Penting |
| | | | | Volume | Satuan | | | | | Volume | Satuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | <i>Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | | <i>Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i> | <i>Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i> | | | | | |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | PERTUMBUHAN UNIT USAHA UMKM | | 1,8 | % | 200.000.000,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | PERTUMBUHAN UNIT USAHA UMKM | | 1,8% | % | 200.000.000,00 | |
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase UMKM yang dibina | | 9,5 | % | 200.000.000,00 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase UMKM yang dibina | | 9,5% | % | 200.000.000,00 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | |
|---------------------|---|--|---------------------|------------------------|------------|----------------|---|--|---------------|------------------------|------------|----------------|---|
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Catatan Penting |
| | | | | Volume | Satuan | | | | | Volume | Satuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.17.07.2.01.04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | Kantor Dinas KUKMPP | 600 | Unit Usaha | 200.000.000,00 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | Kab. Merangin | 425 | Unit Usaha | 100.000.000 | |
| | | | | | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | Kab. Merangin | 60 | Orang | 100.000.000 | Tambahan Sub Kegiatan hasil pemetaan berdasarkan Kepemendagri terbaru |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | <i>Pertumbuhan Omzet UMKM yang ikut program PLUT</i> | | 10 | % | 500.000.000,00 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | <i>Pertumbuhan Omzet UMKM yang ikut program PLUT</i> | | 10 | % | 500.000.000,00 | |
| 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | <i>Persentase UMKM yang ikut program PLUT</i> | | 0,33 | % | 500.000.000,00 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | <i>Persentase UMKM yang ikut program PLUT</i> | | 0,33 | % | 500.000.000,00 | |
| 2.17.08.2.01.01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | <i>Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i> | Kabupaten Merangin | 20 | Unit Usaha | 500.000.000,00 | <i>Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi</i> | <i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i> | | 20 | Unit Usaha | 500.000.000,00 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | |
|---------------------|---|--|--------------------|------------------------|---------|------------------|---|--|--------------------|------------------------|---------|------------------|-----------------|
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Catatan Penting |
| | | | | Volume | Satuan | | | | | Volume | Satuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | 4.155.000.000,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | 4.155.000.000,00 | |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | PERSENTASE KETERSEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | 44 | % | 3.150.000.000,00 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | PERSENTASE KETERSEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | 44 | % | 3.150.000.000,00 | |
| 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Bangunan Pasar Dalam Kondisi Baik | | 28 | % | 3.000.000.000,00 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Bangunan Pasar Dalam Kondisi Baik | | 28 | % | 3.000.000.000,00 | |
| 3.30.03.2.01.01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | Kabupaten Merangin | 2 | Unit | 3.000.000.000,00 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | Kabupaten Merangin | 2 | Unit | 3.000.000.000,00 | |
| 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Persentase Pasar di Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan Yang Pengelolaannya Baik | | 8 | % | 150.000.000,00 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Persentase Pasar di Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan Yang Pengelolaannya Baik | | 8 | % | 150.000.000,00 | |
| 3.30.03.2.02.01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kabupaten Merangin | 12 | Dokumen | 150.000.000,00 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kabupaten Merangin | 12 | Dokumen | 150.000.000,00 | |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | RATA-RATA KENAIKAN HARGA BARANG POKOK | | ≤5 | % | 240.000.000,00 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | RATA-RATA KENAIKAN HARGA BARANG POKOK | | ≤5 | % | 240.000.000,00 | |
| 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang | Jumlah jenis barang kebutuhan barang | | 16 | % | 190.000.000,00 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang | Jumlah jenis barang kebutuhan barang | | 16 | % | 190.000.000,00 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | |
|---------------------|--|---|--------------------|------------------------|----------|----------------------|---|--|--------------------|-------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Targert Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Catatan Penting |
| | | | | Volume | Satuan | | | | | Volume | Satuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/kota | pokok dan barang penting yang dikendalikan harga dan stoknya | | | | | Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/kota | pokok dan barang penting yang dikendalikan harga dan stoknya | | | | | |
| 3.30.04.2.02.02 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Kabupaten Merangin | 12 | Laporan | 120.000.000,00 | <i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</i> | <i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</i> | Kabupaten Merangin | 12 | Laporan | 120.000.000,00 | |
| 3.30.04.2.02.03 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Kabupaten Merangin | 5 | Laporan | 70.000.000,00 | <i>Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i> | Kabupaten Merangin | 5 | Laporan | 70.000.000,00 | |
| 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Tepat Sasaran | | 90 | % | 50.000.000,00 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Tepat Sasaran | | 90 | % | 50.000.000,00 | |
| 3.30.04.2.03.03 | Pengawasan, Penyaluran, dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Kabupaten Merangin | 12 | Laporan | 50.000.000,00 | <i>Pengawasan, Penyaluran, dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</i> | <i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i> | Kabupaten Merangin | 12 | Laporan | 50.000.000,00 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | |
|---------------------|---|---|--------------------|------------------------|--------------|----------------|---|---|--------|-------------------------|--------------|----------------|---|
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Targert Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Catatan Penting |
| | | | | Volume | Satuan | | | | | Volume | Satuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | <i>Jumlah Pelaku UMKM Unggulan Yang Memiliki Kemampuan Ekspor</i> | | 3 | UMKM | 120.000.000,00 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | JUMLAH PELAKU UMKM UNGGULAN YANG MEMILIKI KEMAMPUAN EKSPOR | | 3 | UMKM | 120.000.000,00 | |
| 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Pelaku Usaha Yang Dibina Untuk Ekspor</i> | | 5 | Pelaku Usaha | 120.000.000,00 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Yang Dibina Untuk Ekspor | | 5 | Pelaku Usaha | 120.000.000,00 | |
| 3.30.05.2.01.01 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina</i> | Kabupaten Merangin | 10 | Pelaku Usaha | 120.000.000,00 | <i>Peningkatan Citra Produk Ekspor</i> | <i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi</i> | | 10 | Pelaku Usaha | 120.000.000,00 | Perubahan sub kegiatan hasil pemetaan berdasarkan Kepmendagri yang baru |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARISASI DAN PERLIDUNGAN KONSUMEN | PERSENTASE WAJIB TERA TERTIB UKUR | | 8,33 | % | 170.000.000,00 | PROGRAM STANDARISASI DAN PERLIDUNGAN KONSUMEN | PERSENTASE WAJIB TERA TERTIB UKUR | | 8,33 | % | 170.000.000,00 | |
| 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Persentase Pasar Rakyat di Ibu Kota Kabupaten dan di Ibu Kota Kecamatan Tertib Ukur | | 24 | % | 170.000.000,00 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Persentase Pasar Rakyat di Ibu Kota Kabupaten dan di Ibu Kota Kecamatan Tertib Ukur | | 24 | % | 170.000.000,00 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--------------------|------------------------|--------|--------------------------|---|--|--------------------|------------------------|--------|------------------|-----------------|
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Catatan Penting |
| | | | | Volume | Satuan | | | | | Volume | Satuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.30.06.2.01.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | Kabupaten Merangin | 1000 | Unit | 170.000.000,00 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | Kabupaten Merangin | 1500 | Unit | 170.000.000,00 | |
| 3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | PERTUMBUHAN NILAI TRANSAKSI KOMODITI/PRODUK UNGGULAN | | 10 | % | 475.000.000,00 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | PERTUMBUHAN NILAI TRANSAKSI KOMODITI/PRODUK UNGGULAN | | 10 | % | 475.000.000,00 | |
| 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Persentase komoditi/produk unggulan yang dipromosikan | | 50 | % | 475.000.000,00 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Persentase komoditi/produk unggulan yang dipromosikan | | 50 | % | 475.000.000,00 | |
| 3.30.07.2.01.01 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Menyesuaikan | 30 | UMKM | 475.000.000,00 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Menyesuaikan | 30 | UMKM | 475.000.000,00 | |
| 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | 3.500.000.000,00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | 3.500.000.000,00 | |
| 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | PERTUMBUHAN UNIT USAHA INDUSTRI | | 10 | % | 3.350.000.000,00 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | PERTUMBUHAN UNIT USAHA INDUSTRI | | 10 | % | 3.350.000.000,00 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------------|------------------------|---------|------------------|--|---|--------------------|-------------------------|---------|------------------|-----------------|
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Targert Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Catatan Penting |
| | | | | Volume | Satuan | | | | | Volume | Satuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Persentase Calon Wirausaha Binaan Yang Tumbuh Menjadi Wirausaha Baru | | 50 | % | 3.350.000.000,00 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Persentase Calon Wirausaha Binaan Yang Tumbuh Menjadi Wirausaha Baru | | 50 | % | 3.350.000.000,00 | |
| 3.31.02.2.01..01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | Kabupaten Merangin | 1 | Dokumen | 250.000.000,00 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | Kabupaten Merangin | 1 | Dokumen | 250.000.000,00 | |
| 3.31.02.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | Kantor Dinas KUKMPP | 3 | Dokumen | 350.000.000,00 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Kabupaten Merangin | 3 | Dokumen | 350.000.000,00 | |
| 3.31.02.2.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Kabupaten Merangin | 5 | Dokumen | 2.000.000.000,00 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Kabupaten Merangin | 5 | Dokumen | 2.000.000.000,00 | |
| 3.31.02.2.01.05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Kabupaten Merangin | 5 | Dokumen | 750.000.000,00 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Kabupaten Merangin | 5 | Dokumen | 750.000.000,00 | |
| 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE IKM PENGHASIL PRODUK UNGGULAN YANG | | 11 | % | 100.000.000,00 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE IKM YANG SUDAH SERTIFIKASI (HKI/HALAL/PIRT/T KDN/SNI) | | 11 | Dokumen | 100.000.000,00 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | |
|---------------------|---|--|--------|------------------------|---------|----------------|--|---|--------------------|-------------------------|---------|----------------|-----------------|
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Targert Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Catatan Penting |
| | | | | Volume | Satuan | | | | | Volume | Satuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | SERTIFIKASINYA LENGKAP | | | | | | | | | | | |
| 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase IKM Penghasil Produk Unggulan Yang Difasilitasi Sertifikasinya | | 35 | % | 100.000.000,00 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase IKM Penghasil Produk Unggulan Yang Difasilitasi Sertifikasinya | | 35% | % | 100.000.000,00 | |
| 3.31.03.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan kabupaten/Kota | | 15 | Dokumen | 100.000.000,00 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain | Kabupaten Merangin | 15 | Dokumen | 100.000.000,00 | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | |
|---------------------|---|--|--------------------|------------------------|---------|----------------|---|--|--------------------|------------------------|---------|----------------|-----------------|
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | Catatan Penting |
| | | | | Volume | Satuan | | | | | Volume | Satuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | | | | | |
| 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentasi IKM Yang Masuk Kedalam SIINas | | 1 | % | 50.000.000,00 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | PERSENTASE IKM YANG MASUK KEDALAM SIINas | | 1% | % | 50.000.000,00 | |
| 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Unit Usaha IKM Penghasil Produk Unggulan Yang Masuk SIINas | | 12 | % | 50.000.000,00 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Unit Usaha IKM Penghasil Produk Unggulan Yang Masuk SIINas | | 12% | % | 50.000.000,00 | |
| 3.31.04.2.01.01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Kabupaten Merangin | 10 | Dokumen | 50.000.000,00 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Kabupaten Merangin | 10 | Dokumen | 50.000.000,00 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja OPD tidak dapat dilepaskan dari usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Dilihat dari sumbernya, usulan program dan kegiatan dapat dibagi menjadi empat kelompok sebagai berikut:

a. Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang

Secara umum, usulan masyarakat melalui Musrenbang dapat digolongkan dalam enam kelompok sebagai berikut:

1. Usulan Bantuan Pembangunan/Revitalisasi Pasar

Berdasarkan data SIPD, usulan pembangunan/revitalisasi pasar yang ditujukan kepada Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin terdapat sebanyak 20 usulan.

Mengingat lokasi yang diusulkan untuk pembangunan/revitalisasi pasar dimaksud merupakan aset pemerintah desa berkenaan, serta mengingat kewenangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, maka penganggaran kegiatan pembangunan/revitalisasi pasar desa oleh Pemerintah Kabupaten haruslah melalui mekanisme hibah.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin, penganggaran belanja hibah harus disertai dengan pengajuan permohonan belanja hibah secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati.

Namun sangat disayangkan seluruh usulan pembangunan/ revitalisasi pasar tidak disertai usulan tertulis.

2. Usulan Bantuan Peralatan Bagi UMKM

Berdasarkan data SIPD usulan bantuan peralatan yang ditujukan kepada Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin berjumlah sebanyak lima belas usulan, dan seluruhnya bersifat perorangan. Sesuai Peraturan Bupati Merangin Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin, hanya dikenal sebanyak tujuh jenis hibah, yakni :

a) Hibah kepada Pemerintah

- b) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
- c) Hibah kepada BUMN
- d) Hibah kepada BUMD
- e) Hibah kepada Badan dan Lembaga
- f) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
- g) Hibah kepada Partai Politik

Merujuk pada aturan sebagaimana disebutkan diatas, bantuan/hibah kepada perorangan tidak dapat dianggarkan.

3. Usulan Bantuan Modal Bagi UMKM

Usulan bantuan permodalan terdapat sebanyak sepuluh usulan. Sesuai dokumen Renstra Dinas KUKMPP Tahun 2024-2026, tidak ada kebijakan maupun program/kegiatan/sub kegiatan yang memungkinkan untuk penganggaran bantuan permodalan bagi UMKM. Selain itu, di Kabupaten Merangin belum tersedia regulasi yang dapat dijadikan landasan hukum untuk penganggaran bantuan permodalan bagi pelaku usaha.

Terkait permodalan usaha, Pemerintah Provinsi Jambi sudah menyiapkan program Dua Milyar Satu Kecamatan (Dumisake), dan salah satu aspek yang menjadi prioritas program adalah penyediaan bantuan permodalan usaha bagi UMKM. Selain program Dumisake, Pemerintah Pusat bahkan sudah lebih dulu menyediakan fasilitas permodalan dengan suku bunga rendah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit permodalan usaha melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB).

Merujuk pada kondisi tersebut diatas, maka usulan bantuan permodalan tidak dapat diakomodir.

4. Usulan Pelatihan Bagi Pelaku dan Calon Pelaku UKM

Usulan pelatihan yang ditujukan kepada Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin terdapat sebanyak enam belas usulan, tidak dijelaskan jenis pelatihan yang diinginkan. Sesuai dengan prioritas daerah Kabupaten Merangin, "Peningkatan Ekonomi Daerah Berbasis pertanian dan Pariwisata", maka pelatihan yang dilaksanakan haruslah sesuai dengan prioritas dimaksud. Kendati demikian, usulan pelatihan masih dapat dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan anggaran.

5. Usulan Kurang Jelas

Usulan masih kabur dan kurang jelas maksudnya terdapat sebanyak enam usulan. Dianggap tidak jelas dikarenakan redaksi kalimat yang digunakan yang sangat umum, sehingga sulit untuk difahami maksud dan kebutuhannya.

6. Usulan yang bukan kewenangan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin

Usulan masyarakat yang ditujukan kepada Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin, namun bukan merupakan kewenangan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin terdapat sebanyak tiga usulan. Terhadap usulan yang bukan merupakan kewenangan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin jelas tidak dapat diakomodir.

b. Usulan Reses/Pokir Anggota DPRD

Usulan reses/pokir anggota DPRD Kabupaten Merangin yang disampaikan melalui SIPD hanya terdapat sebanyak dua usulan. Setelah dilakukan telaah, terhadap usulan dimaksud tetap diperlukan usulan tertulis guna memenuhi ketentuan mekanisme penganggaran bantuan/hibah sesuai Peraturan Bupati Merangin Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.

c. Rencana Penganggaran Kembali Kegiatan Tahun 2023 Pada tahun 2024

Rencana penganggaran kembali kegiatan tahun 2023 pada tahun 2024 merupakan hasil perencanaan terintegrasi antara Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Kabupaten Merangin yang difasilitasi Bappeda Kabupaten Merangin Dinas pada tahun 2021, berupa pengadaan mesin sablon untuk kemasan beras Merangin.

Mesin dimaksud sudah dianggarkan pada tahun 2022, namun dikarenakan terjadi pengurangan anggaran, pengadaan mesin dimaksud terpaksa dihapus, dan dimasukkan kembali kedalam anggaran tahun 2023. Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Merangin Nomor: 910/20/BPKAD/2023 tentang Pergeseran Anggaran Dalam Rangka Penyesuaian Belanja Dari Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 tanggal 13 Juni 2023, yang pada intinya berisi instruksi agar OPD penyesuaian belanja, dan

Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin diharuskan mengurangi belanja modal/pengadaan barang dan jasa/hibah sebesar Rp. 1.050.000.000. Kondisi ini memaksa pengadaan mesin sablon kembali harus dihapus dari anggaran tahun 2023.

Sebagai informasi, jika mesin sablon dimaksud tidak diadakan, maka bangunan Rumah Kemasan Beras yang sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2023 tidak dapat difungsikan sesuai peruntukannya.

Bertolak dari kondisi tersebut diatas, maka mesin sablon untuk karung beras Merangin, kembali akan dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2024.

Berikut ini disajikan seluruh usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas KUKMPP tahun anggaran 2023.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan
Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

| No | Pengusul | Permasalahan | Usulan | Lokasi | Besaran / Volume | Hasil Telaah |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------|--|
| A | | | | | | |
| USULAN MASYARAKAT | | | | | | |
| PEMBANGUNAN / REVITALISASI PASAR RAKYAT | | | | | | |
| 1 | Anas (Kepala Desa Sungai Kapas) | Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Fasilitas umum/Sosial | Perlunya renovasi Bangunan Yang Sekarang Ada Terbuat Dari Papan Dan Sudah Berusia 30 Tahun dan Di Kuasai Oleh Pribadi Masyarakat Maka Perlu Penataan Ulang Pasar Desa Volume 30 Un | Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko | 1 Unit | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 2 | Hendrarion | Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan | Pembangunan Pasar Desa | Desa Talang Tembago, Kecamatan Jangkat Timur | 1 Unit | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 3 | Hasan Busrim | Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan | Pembangunan Pasar Desa | Desa Koto Teguh, Kecamatan Jangkat Timur | 1 Unit | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 4 | Juarno | Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan | Bangunan Pasar yang tersedia di Desa Tambang Emas belum cukup untuk menyediakan tempat berjualan untuk para pedagang pasar, banyak pedagang yang berjualan di parkir motor maupun tempat seadanya, dengan hal tersebut Desa Tambang Emas sangat membutuhkan Tambahan Bangunan Los Pasar. | Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan | 1 Unit | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |

| No | Pengusul | Permasalahan | Usulan | Lokasi | Besaran / Volume | Hasil Telaah |
|----|-------------------|--|--|---|------------------|--|
| 5 | Juarno | Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan | untuk meningkatkan fasilitas para pedagang UKM di di desa tambang emas, dibutuhkan pembangunan PUJASERA. | Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan | 1 Unit | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 6 | Saptopo | Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan | Kalau musin hujan lokasi pasar desa licin dan mengenang air, maka perlu adanya parit kanan kiri di lokasi pasar | Desa Sri Sembilan, Kecamatan Tabir Timur | 1 Unit | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 7 | Anhar | Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan | Dengan pembentukan pasar Desa akan mempermudah perdagangan bagi masyarakat untuk memperlancar akses kehidupan dan hasil produksi | Desa Selango, Kecamatan Pamenang Selatan | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 8 | Sri Hermawan, SKM | Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan | Kurangnya sarana dan prasarana pendukung masyarakat di Desa Meranti khususnya dalam bidang perdagangan, maka perlu dibangun Pasar Rakyat Desa Meranti yang nyaman, layak dan aman di Desa Meranti. | Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 9 | DASRIAL | Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan | Perlu bantuan sarana dan prasarana perdagangan bagi masyarakat karena sarana dan prasarana perdagangan belum maksimal' | Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 10 | SUKAMTO | Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan | Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Perdagangan Maka Perlunya Penambahan Bangunan dan Renovasi Pasar Desa Lantak Seribu dikarnakan Banyak Pedagang Yang harus mendirikan Lapak dengan sendirinya disaat Berjualan | Desa Lantak Seribu, Kecamatan Renah Pamenang | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |

| No | Pengusul | Permasalahan | Usulan | Lokasi | Besaran / Volume | Hasil Telaah |
|----|------------------|--|---|---|------------------|--|
| 11 | H. MUHAMMAD UMAR | Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan | Perlunya Rehap WC Umum di Wilayah Pasar Senin sebanyak 2 Paket | Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 12 | SUSILO | Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan | Kurangnya fasilitas Pasar Tradisional Desa | Desa Bukit Beringin, Kecamatan Bangko Barat | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 13 | PURWANTO | Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Fasilitas umum/Sosial | Pasar di desa pinang terlihat begitu semrawut , maka dari itu perlunya pembangunan dan penataan ulang pasar desa agar penjual dan pembeli ini merasa nyaman saat berbelanja | Desa Pinang Merah, Kecamatan Pamenang Barat | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 14 | WALYUDI | Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan | Banyak nya pedang pasar desa pulau tujuh yang belum dapat tempat untuk berjualan karena sedikitnya los pasar desa maka dari itu kami membutuhkan pembangunan los pasar desa sebanyak 3 unit | Desa Pulau Tujuh, Kecamatan Pamenang Barat | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 15 | Imam Mustopa | Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan | Kondisi pasar Desa Sialang rusak, tidak tertata dan perlu penataan ulang sarana dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan | Desa Sialang, Kecamatan pamenang | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 16 | Ayep | Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan | Kurangnya Sarana dan Prasarana yang menunjang Perdagangan di Pasar | Desa Pelakang Jaya, Kecamatan Pamenang | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |

| No | Pengusul | Permasalahan | Usulan | Lokasi | Besaran / Volume | Hasil Telaah |
|------------------------------------|---|---|--|---|------------------|--|
| 17 | Ismail | Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan | Belum adanya kios untuk berdagang di pasar desa | Desa Sungai Udang, Kecamatan Pamenang | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 18 | Sayudin | Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan | Pembangunan Pasar | Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 19 | Marbawi | Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan | Kurang memadainya sarana dan prasarana pasar Desa. Pembangunan Los Pasar Desa Simpang Parit 2 Unit | Desa Simpang Parit, Kecamatan Renah Pembarap | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 20 | Khaidir | Kurangnya infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Perlunya pembangunan kawasan kuliner di Desa Muara delang untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan | Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| BANTUAN PERALATAN BAGI UMKM | | | | | | |
| 1 | AMRIS, S.Pd.I (Kepala Desa Bungo Tanjung) | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Lemahnya ekonomi kerakyatan oleh karna itu perlunya pengadaan ternak itik sebanyak 1000 ekor | Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pangkalan Jambu | 1000 Ekor | Pengadaan ternak bukan kewenangan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin |
| 2 | Juarno | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Banyaknya masyarakat yang mempunyai minat dan bakat menjahit, maka Desa Tambang Emas Sangat membutuhkan Mesin Jahit. | Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |

| No | Pengusul | Permasalahan | Usulan | Lokasi | Besaran / Volume | Hasil Telaah |
|----|-------------------------|--|---|--|------------------|--|
| 3 | Ade Sadria, S.Pd., M.Pd | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Menghidupkan Ekonomi Masyarakat Usaha Mikro Kecil (Industri Air Minum) 1 Paket | Desa Koto Baru, Kecamatan Tabir Lintas | 1 Paket | Bantuan/hibah harus mempedomani Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 4 | H. Muhammad Umar | Daya saing industri kecil dan distribusi sektor industri pada PDRB belum optimal | Perlunya Bantuan Peralatan Industri Kecil Sebanyak 10 Paket | Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang | 10 Paket | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 5 | SUKAMTO | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Masih Minimnya Peralatan Perbengkelan Untuk UMKM, serta Belum adanya alat yang memadai, yang bernaung pada BUMDesa, Perlu Pengadaan, Peralatan Perbengkelan dan Mesin Jahit 10 Paket. | Desa Lantak Seribu, Kecamatan Renah Pamenang | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 6 | Aswadi | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Minimnya alat-alat pertanian/perkebunan sehingga hasil panen kurang produktif | Desa Biuku Tanjung, Kecamatan Bangko Barat | | Pengadaan alat pertanian/perkebunan bukan kewenangan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin |
| 7 | Aswadi | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Kurangnya peralatan menjahit, volume : 10 Unit | Desa Biuku Tanjung, Kecamatan Bangko Barat | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 8 | KHUSAENI | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Masih kurangnya alat-alat produksi untuk menunjang kegiatan produksi bagi pelaku UMKM di desa sungai sahut | Desa Sungai Sahut, Kecamatan Tabir Selatan | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 9 | NUPRIYADI | Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok | dibutuhkan MESIN JAHIT untuk menunjang wirausaha baru dibawah naungan PKK | Desa Sinar Gading, Kecamatan Tabir Selatan | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja |

| No | Pengusul | Permasalahan | Usulan | Lokasi | Besaran / Volume | Hasil Telaah |
|----|---------------|---|--|---|------------------|--|
| | | masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau | | | | Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 10 | KHOIRUL ANAM | Masih rendahnya daya saing produk industri lokal | Pengadaan alat pembuat tempe | Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tabir Selatan | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 11 | KHOIRUL ANAM | Masih rendahnya daya saing produk industri lokal | Pengadaan alat penggiling tepung | Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tabir Selatan | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 12 | KHOIRUL ANAM | Masih rendahnya daya saing produk industri lokal | Pengadaan alat perajang kripik | Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tabir Selatan | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 13 | IDRIS H.LATIP | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Bantuan Mesin Jahit dan Obras Bagi PKK, Bantuan Peralatan Las, Bengkel ataupun Mesin cuci Kendaraan Bagi Karang Taruna | Desa Limbur Merangin Kecamatan Pamenang Barat | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 14 | Aswadi | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Bantuan Peralatan Usaha Kecil Menengah Mikro | Desa Biuku Tanjung, Kecamatan Bangko Barat | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 15 | DASRIAL | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Perlu bantuan peralatan UMKM | Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja |

| No | Pengusul | Permasalahan | Usulan | Lokasi | Besaran / Volume | Hasil Telaah |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|------------------|---|
| | | | | | | Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| BANTUAN PERMODALAN BAGI UMKM | | | | | | |
| 1 | Khaidir Ramli (Lurah Pasar Bangko) | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Tambahan Modal Usaha untuk Kelompok masyarakat yang memiliki keterampilan dibidang Usaha Kecil dan menengah | Kampung Baru II RT. 0012 RW. 005 Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko | | Bantuan permodalan bisa diajukan kepada Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan alokasi program Dumisake UMKM |
| 2 | H. Muhammad Umar | Pelatihan bagi UMKM (kelompok ekonomi produktif) | Perluna Bantuan Modal dan Pelatihan untuk Kelompok UMKM sebanyak 25 Kelompok | Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang | 25 Orang | Bantuan permodalan bisa diajukan kepada Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan alokasi program Dumisake UMKM |
| 3 | SUKAMTO | Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau | Masih Keterbatasan Modal Usaha para pelaku UMKM yang di karenakan Kurangnya Pendanaan Untuk Koperasi Desa, | Desa Lantak Seribu, Kecamatan Renah Pamenang | | Bantuan permodalan bisa diajukan kepada Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan alokasi program Dumisake UMKM |
| 4 | NUPRIYADI | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Dibutuhkan bantuan keuangan berupa modal usaha kecil menengah berupa program KUBE dan lainnya | Desa Sinar Gading, Kecamatan Tabir Selatan | | Bantuan permodalan bisa diajukan kepada Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan alokasi program Dumisake UMKM |
| 5 | KHUSAENI | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Bantuan Modal bagi Pelaku UMKM RTM di desa Sungai sahut | Desa Sungai Sahut, Kecamatan Tabir Selatan | | Bantuan permodalan bisa diajukan kepada Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan alokasi program Dumisake UMKM |
| 6 | KHOIRUL ANAM | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Masih banyak pedagang yang belum meningkat hasil penjualan, dikarenakan modal yang belum tercukupi | Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tabir Selatan | | Bantuan permodalan bisa diajukan kepada Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan alokasi program Dumisake UMKM |
| 7 | ARKANDI | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Kekurangan modal dalam pengembangan usaha UMKM | Desa Bedeng Rejo, Kecamatan Bangko Barat | | Bantuan permodalan bisa diajukan kepada Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan alokasi program Dumisake UMKM |

| No | Pengusul | Permasalahan | Usulan | Lokasi | Besaran / Volume | Hasil Telaah |
|--|-------------------------|--|--|---|------------------|--|
| 8 | NUR WIDIYANTO | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Perlunya penambahan Modal UMKM serta Sarpas UMKM yang sesuai Kebutuhan usahanya di Desa Gading Jaya | Desa Gading Jaya, Kecamatan Tabir Selatanb | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 9 | PURWANTO | Pelatihan bagi UMKM (kelompok ekonomi produktif) | Perlunya Usaha Mandiri untuk Meningkatkan Ekonomi bagi masyarakat, salah satunya adalah pengadaan hewan ternak | Desa Pinang Merah, Kecamatan Pamenang Barat | | Pengadaan ternak bukan kewenangan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin |
| 10 | M. Taher | Masih rendahnya kapasitas para pengelola koperasi | Disebabkan tidak adanya pembiyaan untuk mendirikan koperasi/bumdes desa dengan perlu anggaran untuk membangun koperasi/bumdes desa | Desa Pulau Lebar, Kecamatan Tabir Barat | | Pendirian koperasi dapat difasilitasi melalui penyuluhan koperasi |
| PELTIHAN BAGI PELAKU UMKM DAN CALON PELAKU UMKM | | | | | | |
| 1 | Assarpi | Masih rendahnya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Belum adanya pelatihan kepemudaan di wilayah Desa Sungai Bulian | Desa Sungai Bulian, Kecamatan Tabir Timur | | Dapat dipertimbangkan untuk pelatihan kewirausahaan sesuai kemampuan anggaran |
| 2 | Assarpi | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Masih minimnya usaha dalam meningkatkan UP2K | Desa Sungai Bulian, Kecamatan Tabir Timur | | Dapat dipertimbangkan untuk pelatihan kewirausahaan sesuai kemampuan anggaran |
| 3 | Ade Sadria, S.Pd., M.Pd | Masih rendahnya kualitas SDM di Bidang pertanian | Menghidupkan Ekonomi Masyarakat Pelatihan Menganyam Bambu 1 Paket | Desa Koto Baru, Kecamatan Tabir Lintas | | Dapat dipertimbangkan untuk pelatihan anyaman bambu sesuai kemampuan anggaran |
| 4 | Agusdar Hamid | Daya saing industri kecil dan distribusi sektor industri pada PDRB belum optimal | Perlu Pengembangan atau pembinaan Home Industri Bubuk Kopi yang ada agar bisa berkembang | Desa Muara Madras, Kecamatan Jangkat | | Dapat dipertimbangkan untuk pelatihan kewirausahaan sesuai kemampuan anggaran |
| 5 | Agusdar Hamid | Peningkatan kemampuan kelompok petani dalam hal teknologi pasca panen | Pelatihan Kewirausahaan Home industri | Desa Muara Madras, Kecamatan Jangkat | | Dapat dipertimbangkan untuk pelatihan kewirausahaan sesuai kemampuan anggaran |

| No | Pengusul | Permasalahan | Usulan | Lokasi | Besaran / Volume | Hasil Telaah |
|----|-------------------|---|---|---|------------------|---|
| 6 | Sri Hermawan, SKM | Masih rendahnya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Peningkatan kemampuan Pelaku Usaha UMKM dan Peralatannya di Desa Meranti perlu lebih ditingkatkan dan dioptimalkan, sehingga kedepannya perlu adanya Bantuan Pelatihan dan Peralatan UMKM di Desa Meranti | Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang | | Dapat dipertimbangkan untuk pelatihan kewirausahaan sesuai kemampuan anggaran |
| 7 | DASRIAL | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Perlu Pelatihan UMKM bagi masyarakat | Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat | | Dapat dipertimbangkan untuk pelatihan kewirausahaan sesuai kemampuan anggaran |
| 8 | NUPRIYADI | Masih rendahnya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Dibutuhkan bimbingan teknis dan alat pengolahan PRODUK UMKM | Desa Sinar Gading, Kecamatan Tabir Selatan | | Dapat dipertimbangkan untuk pelatihan kewirausahaan sesuai kemampuan anggaran |
| 9 | NUPRIYADI | Pelatihan bagi UMKM (kelompok ekonomi produktif) | dibutuhkan pendampingan dan pelatihan UMKM | Desa Sinar Gading, Kecamatan Tabir Selatan | | Dapat dipertimbangkan untuk pelatihan kewirausahaan sesuai kemampuan anggaran |
| 10 | IDRIS H.LATIP | Pelatihan dan pendampingan ekonomi kreatif | Tidak adanya UMKM di desa, Perlu ada bimbingan dan pelatihan bagi kader PKK maupun Karang Taruna Desa | Desa Limbur Merangin Kecamatan Pamenang Barat | | Dapat dipertimbangkan untuk pelatihan kewirausahaan sesuai kemampuan anggaran |
| 11 | PURWANTO | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Kurangnya lapangan pekerjaan dan kreatifitas, maka dari itu perlunya pelatihan UMKM | Desa Pinang Merah, Kecamatan Pamenang Barat | | Dapat dipertimbangkan untuk pelatihan kewirausahaan sesuai kemampuan anggaran |
| 12 | Udianri S.Pd.I | Masih rendahnya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Minimnya masyarakat desa pulau tebakar tentang ekonomi kreatif | Desa Pulau Tebakar, Kecamatan Tabir Barat | | Dapat dipertimbangkan untuk pelatihan kewirausahaan sesuai kemampuan anggaran |
| 13 | Sandri Can Indra | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Masih Kurang Wawasan Terhadap Pengembangan UMKM, Karena Di butuhkan Pelatihan Cara Pengembangan UMKM, Seperti Menjahit, dan UMKM lainnya, | Desa Muara Kibul, Kecamatan Tabir Barat | | Dapat dipertimbangkan untuk pelatihan kewirausahaan sesuai kemampuan anggaran |

| No | Pengusul | Permasalahan | Usulan | Lokasi | Besaran / Volume | Hasil Telaah |
|----------------------------|----------------|--|---|--|------------------|---|
| 14 | SUKRON H,S.H | Masih rendahnya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Supaya Adanya Pelatihan Ini Memberi Dampak Yang Baik | Desa Marus Jaya, Kecamatan Renah Pembarap | | Dapat dipertimbangkan untuk pelatihan kewirausahaan sesuai kemampuan anggaran |
| 15 | AGUS HAPKANDRI | Pelatihan dan pendampingan ekonomi kreatif | Banyaknya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan, sampah plastik botol bekas minuman dan plastik lainnya, perlunya bantuan untuk pengolahan sampah tersebut menjadi energi terbarukan seperti Bahan Bakar Minyak (BBM). dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. | Desa Gelanggang, Kecamatan Sungai Manau | | Dapat dipertimbangkan untuk pelatihan kewirausahaan sesuai kemampuan anggaran |
| 16 | Zainuddin | Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau | Tidak adanya koperasi desa dan menyulitkan masyarakat dalam mencari bahan pokok | Desa Rantau Limau Kapas, Kecamatan Tiang Pumpung | | Dapat difasilitasi untuk pembentukan koperasi |
| USULAN KURANG JELAS | | | | | | |
| 1 | ISROWADI,S.Pd | Kurangnya Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Lokal | Lambatnya pengeringan hasil usaha tani. | Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara Siau | | Usulan perlu diperjelas dengan proposal |
| 2 | ISROWADI,S.Pd | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Kurang Berkembangnya Usaha Masyarakat. | Desa Peradun Temeras, Kecamatan Muara Siau | | Usulan perlu diperjelas dengan proposal |
| 3 | M. Hambali | Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau | Ekonomi masyarakat yang masih rendah,sehingga membutuhkan perhatian dan bantuan pemerintah | Desa Durian Rambu, Kecamatan Muara Siau | | Usulan perlu diperjelas dengan proposal |

| No | Pengusul | Permasalahan | Usulan | Lokasi | Besaran / Volume | Hasil Telaah |
|--|-------------|--|---|--|------------------|--|
| 4 | AHYAK UDDIN | Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau | Karena kebutuhan pokok yang tak terjangkau.sehingga yang di butuhkan masyarakat ada nya KUD | Desa Lubuk Birah, Kecamatan Muara Siau | | Usulan perlu diperjelas dengan proposal |
| 5 | Marzuki | Masih rendahnya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Meningkatkan perekonomian | Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tabir Barat | | Usulan perlu diperjelas dengan proposal |
| 6 | DASRIAL | Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau | Perlu kebutuhan pokok dan harga maksimal | Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat | | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| USULAN YANG BUKAN KEWENANGAN DINAS KUKMPP | | | | | | |
| 1 | NUPRIYADI | Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau | Perlunya pembuatan jalan baru menuju daerah perkotaan agar akses lancar dalam pendistribusian bahan pangan dan hasil produksi | Desa Sinar Gading, Kecamatan Tabir Selatan | | Pembangunan/pembuatan jalan bukan kewenangan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin |
| 2 | Lasno | Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan produk makanan yang kadaluwarsa | PMT POSYANDU SEJAHTERA DUDUN BUNGO SALAM | Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tabir Selatan | | Pembangunan Posyandu bukan kewenangan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin |
| 3 | M. Hambali | Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan | Akses jalan kurang mengizinkan dan jauh dari kecamatan serta kurangnya sinyal, | Desa Durian Rambu, | | Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan bukan kewenangan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin |

| No | Pengusul | Permasalahan | Usulan | Lokasi | Besaran / Volume | Hasil Telaah |
|----------|---|---|--|--|------------------|--|
| | | kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau | sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah setempat | Kecamatan Muara Siau | | |
| B | USULAN RESES / POKOK PIKIRAN | | | | | |
| 1. | M. Yani, Amd | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Belum adanya alat cetak batako didesa kungkai kecamatan bangko | Desa Kungkai, Kecamatan Bangko | 3 Set | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| 2. | Zainal Amri | Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM | Program umkm melalui kelompok tani atau perorangan untuk desa Bukit Batu Kec. Sungai Manau , Desa Kampung limo Kec.Pangkalan Jambu | Desa Bukit Batu Kec. Sungai Manau, Desa Birun Kec.Pangkalan Jambu, Desa kampung Limo Kec. Pangkalan Jambu, Kab. Merangin | 5 Paket | Harus disertai usulan tertulis ditujukan kepada Kepala Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Merangin |
| C | KEGIATAN TAHUN 2023 YANG DIANGGARKAN KEMBALI PADA TAHUN 2023 | | | | | |
| 1. | | | Pengadaan Mesin Sablon untuk Kemasan Beras Merangin | Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulur, Desa Seling Kecamatan Tabir, Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau dan Desa Kampung Limo Kecamatan Pangkalan Jambu | 4 Unit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan terintegrasi untuk mendukung pencapaian Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian 2. Jika tidak dianggarkan kembali, maka Rumah Kemasan Beras Merangin yang sudah dibangun tidak dapat difungsikan sesuai peruntukannya. |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan upaya untuk menyingkronkan kebijakan nasional dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, terdapat tujuh prioritas nasional.

Namun sesuai dengan tugas fungsi yang diemban oleh Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin yakni Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian, seluruhnya bersinggungan dengan ekonomi, maka yang paling tepat adalah:

Prioritas Nasional 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

Secara lengkap, telaah kebijakan nasional terhadap kesesuaian kewenangan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Telaah Arah dan Kebijakan Nasional Yang Terkait Dengan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin Tahun 2024

| Nasional | | Dinas KUKMPP | |
|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| Prioritas Nasional 1 | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | Prioritas Daerah Kabupaten Merangin | Pembangunan perekonomian daerah berbasis sumberdaya bidang pertanian dan pariwisata |
| Sasaran | Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing ekonomi | Sasaran Strategis Dinas KUKMPP | Meningkatnya kesejahteraan pelaku koperasi dan UMKM Stabilitas harga Meningkatnya pertumbuhan IKM |
| Indikator Sasaran | Rasio kewirausahaan nasional Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Kontribusi PDB Industri Pengolahan Pertumbuhan investasi | Indikator Sasaran | Persentase koperasi berkualitas Persentase UMKM naik kelas Pertumbuhan nilai perdagangan Rata-rata selisih harga bahan pokok tingkat pasar rakyat terhadap harga acuan Pertumbuhan nilai produksi IKM Pertumbuhan nilai investasi IKM |
| Program Prioritas | Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi | Program Prioritas | Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi</p> | | <p>Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi</p> <p>Program pendidikan dan latihan perkoperasian</p> <p>Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)</p> <p>Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</p> <p>Program standardisasi dan perlindungan konsumen</p> <p>Program peningkatan sarana distribusi perdagangan</p> <p>Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</p> <p>Program perencanaan dan pembangunan industri</p> <p>Program pengendalian izin usaha industri</p> |
|--|--|--|---|

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

a. Tujuan

Berdasarkan Renstra Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin tahun 2024-2026, terdapat tiga tujuan yang hendak dicapai. Ketiga tujuan tersebut jika dikaitkan dengan isu-isu strategis sesuai tugas dan fungsi Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM Terhadap Perekonomian Daerah

Merujuk pada isu strategis, permasalahan dan tantangan yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, maka seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM bertujuan untuk meningkatkan kualitas koperasi dan UKM. Peningkatan kualitas yang dimaksud adalah peningkatan kualitas kelembagaan, peningkatan kemampuan kewirausahaan pelaku UKM dan koperasi yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing koperasi dan UKM.

2) Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian Daerah

Berdasarkan data yang dirilis BPS Kabupaten Merangin, sektor perdagangan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari 5,63% pada tahun 2021, naik menjadi 7,53% pada tahun 2022.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang tertuang dalam Renja tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan aktifitas perdagangan guna meningkatkan volume dan nilai perdagangan yang pada akhirnya mampu mendorong peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

3) Meningkatkan Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap Perekonomian Daerah

Berdasarkan data yang dirilis BPS Kabupaten Merangin, sektor perindustrian tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari pertumbuhan sebesar 5,88% pada tahun 2021, menjadi hanya 4,39% tahun 202, atau turun sebesar 1,49%

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian bertujuan untuk terus meningkatkan kondisi industri, terutama industri kecil dan menengah yang menjadi fokus Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin guna meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

b. Sasaran

Selanjutnya guna mencapai tujuan sebagaimana disebutkan diatas, serta dikaitkan dengan Renstra Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin, maka beberapa sasaran yang hendak dicapai melalui Renja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Koperasi dan UMKM

Sesuai dengan redaksi sasaran, terdapat dua hal yang hendak dicapai, sebagai berikut :

a) Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Koperasi

Secara sederhana, baik atau buruknya kinerja sebuah koperasi, dapat dilihat dari mampu tidak atau tidaknya koperasi tersebut mendatangkan manfaat bagi anggotanya secara ekonomi. Dapat dipastikan, koperasi akan ditinggalkan oleh anggotanya manakala koperasi tersebut tidak mendatangkan manfaat secara ekonomi, dan sebaliknya anggota akan merasa sangat membutuhkan koperasi ketika kehadiran koperasi mampu mendatangkan manfaat secara ekonomi.

Sesuai dengan Renstra Dinas KUKMPP tahun 2024-2026, peningkatan kinerja koperasi dalam mendatangkan kesejahteraan bagi anggotanya diukur dengan indikator pertumbuhan volume usaha koperasi, dan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar tumbuh sebesar 1,5%.

Beranjak dari sasaran dan target diatas, maka beberapa fokus yang hendak dicapai melalui Renja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, yang ditandai dengan peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT.
- Peningkatan modal dan volume usaha koperasi

- Meningkatnya kapasitas SDM pengurus dan pengawas
 - Menurunnya jumlah koperasi tidak aktif
- b) Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku UMKM

Untuk mengukur kesejahteraan pelaku UMKM, digunakan indikator pertumbuhan omset UMKM, dan pada tahun 2024 ditargetkan tumbuh sebesar 10%. Beberapa fokus yang hendak dicapai melalui Renja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM
- Penguatan permodalan UMKM
- Pengembangan UMKM melalui inkubator usaha PLUT.

2) Stabilitas Harga

Stabilitas harga diukur dengan indikator statistik yakni koefisien variasi harga antar waktu, tahun 2024 ditargetkan tidak lebih dari 5%. Beberapa fokus yang hendak dicapai melalui Renja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan sarana distribusi perdagangan
- b) Peningkatan pengawasan stok dan harga barang pokok
- c) Peningkatan perlindungan terhadap konsumen

3) Meningkatnya Omset Usaha Produk Unggulan

Peningkatan omset usaha produk unggulan daerah merupakan aspek penting yang menjadi fokus perencanaan Dinas KUKMPP. Pada tahun 2024, omset usaha produk unggulan daerah ditargetkan tumbuh sebesar 6%. Untuk mencapai target tersebut, beberapa fokus rencana adalah sebagai berikut :

- a) Perluasan pasar produk unggulan daerah melalui promosi dan expo
- b) Mempersiapkan dan menumbuhkan pelaku usaha yang memiliki kemampuan ekspor.

4) Meningkatnya Produksi IKM

Peningkatan produksi IKM diukur dengan indikator pertumbuhan produksi IKM, dan tahun 2024 ditargetkan sebesar 3%. Beberapa fokus yang hendak dilaksanakan melalui Renja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM

- b) Peningkatan sarana dan prasarana industri melalui revitalisasi sentra IKM
- c) Peningkatan sertifikat IKM
- d) Kolaborasi dengan urusan perdagangan dan urusan koperasi UKM dalam perluasan pasar, peningkatan permodalan, kewirausahaan dan pemanfaatan teknologi.

Selanjutnya secara lengkap tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja digambar melalui table dibawah ini :

Tabel 3.2
Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas KUKMPP Tahun 2024

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Tahun 2023 |
|--|--|---------------------------|
| Urusan Koperasi dan UKM | | |
| Meningkatnya kesejahteraan pelaku koprasi dan UMKM | Pertumbuhan volume usaha koperasi | 1,5% |
| | Pertumbuhan omset UMKM | 10% |
| Urusan Perdagangan | | |
| Stabilitas harga | Koefisien variasi harga antar waktu | ≤ 5% |
| Meningkatnya omset pelaku usaha produk unggulan | Pertumbuhan omset usaha produk unggulan daerah | 6% |
| Urusan Perindustrian | | |
| Meningkatnya produksi IKM | Pertumbuhan nilai produksi IKM | 3% |

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sebelum sampai pada rumusan program dan kegiatan, terlebih dahulu dijelaskan beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam penentuan rumusan program sebagai berikut

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan adalah :
 - 1) Mendukung arah dan kebijakan pembangunan nasional tahun 2024
 - 2) Mendukung arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Merangin

3) Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas KUKMPP

b. Ringkasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Secara keseluruhan pada tahun 2024, akan dilaksanakan sebanyak 15 program, 24 kegiatan dan 47 sub kegiatan yang terbagi dalam program utama dan penunjang sebagai berikut ;

Program Utama

- 1) Urusan Koperasi dan UKM, 6 program, 6 kegiatan, dan 7 sub kegiatan
- 2) Urusan Perdagangan 5 program, 7 kegiatan, dan 7 sub kegiatan
- 3) Urusan Perindustrian 3 program, 3 kegiatan, 7 sub kegiatan

Program Penunjang

Selanjutnya untuk penunjang terdapat 1 program, 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan

c. Sebaran Lokasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Secara umum lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Merangin. Namun untuk kegiatan pembangunan fisik berlokasi di Kecamatan Bangko, sedangkan urusan Koperasi dan UKM serta kegiatan lain yang bersifat pembinaan, lokasinya menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Merangin, karena menyesuaikan dengan eksisting UMKM dan IKM serta pelaku perdagangan.

d. Kebutuhan Dana Indikatif

Untuk membiayai pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 13.955.000.000 sesuai bidang urusan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | : 5.230.000.000 |
| - Urusan Koperasi dan UKM | : 1.070.000.000 |
| - Urusan Perdagangan | : 4.155.000.000 |
| - Urusan Perindustrian | : 3.500.000.000 |

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan Praperkiraan Maju Tahun 2025
Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2024 | |
|---|--|--|---------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KUKMPP | | NILAI AKIP DINAS KUKMPP | BB | | | | | 96.5 % | 6.262.000.000,00 |
| 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | 96.5 % | 5.230.000.000 | | | BB | |
| | | NILAI EVALUASI AKIP DINAS KUKMPP | | BB | | | | 94,5 % | 73.000.000,00 |
| 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | | 94,5 % | 68.000.000 | DAU | | 2 Dokumen | 40.000.000,00 |
| 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kantor Dinas KUKMPP | 2 Dokumen | 35.000.000 | DAU | | 2 Dokumen | 9.000.000,00 |
| 2.17.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | Kantor Dinas KUKMPP | 2 Dokumen | 9.000.000 | DAU | | 2 Dokumen | 9.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2024 | |
|-------------------|---|--|---------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | |
| 2.17.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 2 Dokumen | 9.000.000 | DAU | | 3 Laporan | 7.000.000,00 |
| 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 3 Laporan | 7.000.000 | | | 4 Laporan | 8.000.000,00 |
| 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kantor Dinas KUKMPP | 4 Laporan | 8.000.000 | | | 92,5 % | 4.039.000.000,00 |
| 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 92,5 % | 4.014.000.000 | DAU | | 518 Orang/Bulan | 3.870.000.000,00 |
| 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kantor Dinas KUKMPP | 518 Orang/Bulan | 3.850.000.000 | DAU | | 12 Dokumen | 155.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2024 | |
|-------------------|---|---|---------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.17.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 12 Dokumen | 150.000.000 | DAU | | 1 Laporan | 7.000.000,00 |
| 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 1 Laporan | 7.000.000 | DAU | | 1 Laporan | 7.000.000,00 |
| 2.17.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 1 Laporan | 7.000.000 | | | 95,5% | 7.000.000,00 |
| 2.17.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar | | 95,5% | 7.000.000 | DAU | | 4 Laporan | 7.000.000,00 |
| 2.17.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 4 Laporan | 7.000.000 | | | 95,5% | 230.000.000,00 |
| 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 95,5% | 195.000.000 | DAU | | 114 Paket | 150.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2024 | |
|---------------------|--|--|---------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.17.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Kantor Dinas KUKMPP | 114 Paket | 125.000.000 | | | 5 Orang | 80.000.000,00 |
| 2.17.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kantor Dinas KUKMPP | 5 Orang | 70.000.000 | | | 95,5 % | 335.000.000,00 |
| 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 95,5 % | 324.000.000 | DAU | | 1 Paket | 15.000.000,00 |
| 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 1 Paket | 13.000.000 | DAU | | 1 Paket | 50.000.000,00 |
| 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 1 Paket | 48.000.000 | | | 1 Paket | 15.000.000,00 |
| 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 1 Paket | 13.000.000 | DAU | | 60 Laporan | 255.000.000,00 |
| 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Menyesuaikan | 60 Laporan | 250.000.000 | | | 77% | 1.100.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2024 | |
|-------------------|--|--|---------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah | | 77% | 155.000.000 | | | 1 Unit | 450.000.000,00 |
| 2.17.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 1 Unit | 0,00 | | | 1 Unit | 500.000.000,00 |
| 2.17.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 1 Unit | 0,00 | | | 30 Unit | 40.000.000,00 |
| 2.17.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 30 Unit | 50.000.000 | DAU | | 4 Unit | 80.000.000,00 |
| 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 4 Unit | 80.000.000 | | | 3 Unit | 30.000.000,00 |
| 2.17.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 3 Unit | 25.000.000 | | | 91% | 312.000.000,00 |
| 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 91% | 307.000.000 | DAU | | 12 Laporan | 2.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2024 | |
|---|--|--|---------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kantor Dinas KUKMPP | 12 Laporan | 2.000.000 | DAU | | 12 Laporan | 150.000.000,00 |
| 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 12 Laporan | 145.000.000,00 | DAU | | 12 Laporan | 160.000.000,00 |
| 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 12 Laporan | 160.000.000,00 | | | 62% | 166.000.000,00 |
| 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 62 % | 160.000.000,00 | DAU | | 20 Unit | 155.000.000,00 |
| 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kantor Dinas KUKMPP | 20 Unit | 150.000.000,00 | DAU | | 15 Unit | 11.000.000,00 |
| 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kantor Dinas KUKMPP | 15 Unit | 10.000.000,00 | | | | 1.215.000.000,00 |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM | | | | 1.070.000.000,00 | | | 22% | 110.000.000,00 |
| SASARAN : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN | PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI | | | 1,5% | | | | 22% | 110.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2024 | |
|--------------------------|---|---|--------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| PELAKU KOPERASI DAN UMKM | | | | | | | | | |
| | PERTUMBUHAN OMSET UMKM | | | 10% | | DAU | | 50 Unit Usaha | 110.000.000,00 |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | PERSENTASE KOPERASI BERSERTIFIKAT NIK | | 22 % | 100.000.000,00 | | | 5% | 80.000.000,00 |
| 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Koperasi RAT | | 22 % | 100.000.000,00 | | | 13% | 80.000.000,00 |
| 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | Kabupaten Merangin | 60 Unit Usaha | 100.000.000,00 | DAU | | 30 Unit Usaha | 80.000.000,00 |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | PERSENTASE KSP/USP-KOPERASI BERPREDIKAT SEHAT | | 5% | 70.000.000,00 | | | 17% | 120.000.000,00 |
| 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kepatuhan KSP/USP-Koperasi | | 13% | 70.000.000,00 | | | 75% | 120.000.000,00 |
| 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | Kabupaten Merangin | 60 Unit Usaha | 70.000.000,00 | DAU | | 30 Orang | 120.000.000,00 |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | PERSENTASE PENGURUS MEMILIKI PEMAHAMAN BAIK DALAM MANAJEMEN KOPERASI | | 17% | 100.000.000,00 | | | 1.50 % | 105.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2024 | |
|-------------------|--|---|-------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rata-Rata Tingkat Pemahaman Peserta Terhadap Materi Pelatihan Koperasi | | 75% | 100.000.000,00 | | | 30 % | 105.000.000,00 |
| 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | Kec. Bangko | 90 Orang | 100.000.000,00 | | | 20 Unit Usaha | 105.000.000,00 |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Pertumbuhan modal koperasi | | 1.50 % | 100.000.000,00 | | | 1,8% | 250.000.000,00 |
| 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang memanfaatkan fasilitas permodalan/pembiayaan pemerintah (KUR/LPDB) | | 30 % | 100.000.000,00 | | | 9,5% | 250.000.000,00 |
| 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | 20 Unit Usaha | 100.000.000,00 | DAU | | 600 Unit Usaha | 250.000.000,00 |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA | PERTUMBUHAN UNIT USAHA UMKM | | 1,8% | 200.000.000,00 | | | 10 % | 550.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2024 | |
|-------------------|--|--|---------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | | | | |
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase UMKM yang dibina | | 9,5% | 200.000.000,00 | | | 0,33 % | 550.000.000,00 |
| 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | Kab. Merangin | 425 Unit Usaha | 100.000.000 | | | 20 Unit Usaha | 550.000.000,00 |
| 2.17.07.2.01.015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | Kab. Merangin | 60 orang | 100.000.000 | | | | 4.945.000.000,00 |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Pertumbuhan Omzet UMKM yang ikut program PLUT | | 10 % | 500.000.000,00 | | | 44% | 3.370.000.000,00 |
| 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Persentase UMKM yang ikut program PLUT | | 0,33 % | 500.000.000,00 | | | 28% | 3.200.000.000,00 |
| 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber | | 20 Unit Usaha | 500.000.000,00 | DAU DAK | | 2 Unit | 3.200.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2024 | |
|----------------------------|---|---|---------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | <i>Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i> | | | | | | | |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | 4.155.000.000,00 | | | 8% | 170.000.000,00 |
| SASARAN : STABILITAS HARGA | KOEFISIEN VARIASI HARGA ANTAR WAKTU | | ≤5% | | | DAU | | 12 Dokumen | 170.000.000,00 |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | PERSENTASE KETERSEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | 44 % | 3.150.000.000,00 | | | ≤5% | 265.000.000,00 |
| 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Bangunan Pasar Dalam Kondisi Baik | | 28% | 3.000.000.000,00 | | | 16% | 210.000.000,00 |
| 3.30.03.2.01.0001 | <i>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</i> | <i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i> | <i>Kabupaten Merangin</i> | 2 Unit | 3.000.000.000,00 | DAU | | 12 Laporan | 130.000.000,00 |
| 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Persentase Pasar di Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan Yang Pengelolaannya Baik | | 8% | 150.000.000,00 | DAU | | 5 Laporan | 80.000.000,00 |
| 3.30.03.2.02.0001 | <i>Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i> | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i> | <i>Kabupaten Merangin</i> | 12 Dokumen | 150.000.000,00 | | | 90% | 55.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2024 | |
|-------------------|--|---|--------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | RATA-RATA KENAIKAN HARGA BARANG POKOK | | ≤5% | 240.000.000,00 | DAU | | 12 Laporan | 55.000.000,00 |
| 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/kota | Jumlah jenis barang kebutuhan barang pokok dan barang penting yang dikendalikan harga dan stoknya | | 16% | 190.000.000,00 | | | 3 UMKM | 130.000.000,00 |
| 3.30.04.2.02.0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Kabupaten Merangin | 12 Laporan | 120.000.000,00 | | | 5 Pelaku Usaha | 130.000.000,00 |
| 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Kabupaten Merangin | 5 Laporan | 70.000.000,00 | | | 10 Pelaku Usaha | 130.000.000,00 |
| 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Tepat Sasaran | | 90% | 50.000.000,00 | | | 8,33% | 680.000.000,00 |
| 3.30.04.2.03.0003 | Pengawasan, Penyaluran, dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida | Kabupaten Merangin | 12 Laporan | 50.000.000,00 | | | 24% | 680.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2024 | |
|--|---|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | <i>Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i> | | | | | | | |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARISASI DAN PERLIDUNGAN KONSUMEN | PERSENTASE WAJIB TERA TERTIB UKUR | | 8,33% | 170.000.000,00 | DAU | | 1000 Unit | 680.000.000,00 |
| 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Persentase Pasar Rakyat di Ibu Kota Kabupaten dan di Ibu Kota Kecamatan Tertib Ukur | | 24% | 170.000.000,00 | | | 10% | 500.000.000,00 |
| 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | Kabupaten Merangin | 1500 Unit | 170.000.000,00 | | | 50% | 500.000.000,00 |
| SASARAN : MENINGKATNYA OMSET USAHA PRODUK UNGGULAN | PERTUMBUHAN OMSET USAHA PRODUK UNGGULAN DAERAH | | 6% | | | DAU | | 30 UMKM | 500.000.000,00 |
| 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | JUMLAH PELAKU UMKM UNGGULAN YANG MEMILIKI KEMAMPUAN EKSPOR | | 3 UMKM | 120.000.000,00 | | | | 4.175.000.000,00 |
| 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Yang Dibina Untuk Ekspor | | 5 Pelaku Usaha | 120.000.000,00 | | | 10% | 4.000.000.000,00 |
| 3.30.05.2.01.0005 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi | | 10 Pelaku Usaha | 120.000.000,00 | | | 50% | 4.000.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2024 | |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | PERTUMBUHAN NILAI TRANSAKSI KOMODITI/PRODUK UNGGULAN | | 10% | 475.000.000,00 | DAU | Penyusunan dokumen RPIK Kab. Merangin | 1 Dokumen | 100.000.000,00 |
| 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Persentase komoditi/produk unggulan yang dipromosikan | | 50% | 475.000.000,00 | DAU | | 3 Dokumen | 400.000.000,00 |
| 3.30.07.2.01.0005 | <i>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i> | <i>Menyesuaikan</i> | 30 UMKM | 475.000.000,00 | DAU | | 5 Dokumen | 2.500.000.000,00 |
| 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | 3.500.000.000,00 | DAK DAU | | 5 Dokumen | 1.000.000.000,00 |
| SASARAN : MENINGKATNYA PRODUKSI IKM | PERTUMBUHAN NILAI PRODUKSI IKM | | | 3% | | | | 11 % | 100.000.000,00 |
| 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | PERTUMBUHAN UNIT USAHA INDUSTRI | | 10% | 3.350.000.000,00 | | | 35% | 120.000.000,00 |
| 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Persentase Calon Wirausaha Binaan Yang Tumbuh Menjadi Wirausaha Baru | | 50% | 3.350.000.000,00 | DAU | | 15 Dokumen | 120.000.000,00 |
| 3.31.02.2.01.0003 | <i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i> | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan</i> | <i>Kabupaten Merangin</i> | 3 Dokumen | 350.000.000,00 | | | 12% | 55.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2024 | |
|-------------------|--|---|--------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Sumber Daya Industri | | | | | | | |
| 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Kabupaten Merangin | 5 Dokumen | 2.000.000.000,00 | | | 10 Dokumen | 55.000.000,00 |
| 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Kabupaten Merangin | 5 Dokumen | 750.000.000,00 | DAK DAU | | 5 Dokumen | 1.000.000.000,00 |
| 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE IKM YANG SUDAH SERTIFIKASI (HKI/HALAL/PIRT/TK DN/SNI) | | 11 % | 100.000.000,00 | | | 11 % | 100.000.000,00 |
| 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IU), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase IKM Penghasil Produk Unggulan Yang Difasilitasi Sertifikasinya | | 35% | 100.000.000,00 | | | 35% | 120.000.000,00 |
| 3.31.03.2.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis | Kabupaten Merangin | 15 Dokumen | 100.000.000,00 | DAU | | 15 Dokumen | 120.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2024 | |
|-------------------|---|--|--------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | | | | | | | |
| 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | PERSENTASE IKM YANG MASUK KEDALAM SIINas | | 1% | 50.000.000,00 | | | 1% | 55.000.000,00 |
| 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Unit Usaha IKM Penghasil Produk Unggulan Yang Masuk SIINas | | 12% | 50.000.000,00 | | | 12% | 55.000.000,00 |
| 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem | Kabupaten Merangin | 10 Dokumen | 50.000.000,00 | | | 10 Dokumen | 55.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2024 | |
|----|---|---|------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | <i>Informasi Industri Nasional (SIINas)</i> | | | | | | | |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Indikator Kinerja

Adapun indikator kinerja pada Dinas KUKMPP yang mengacu pada RPD Kabupaten Merangin tahun 2024 – 2026 digambarkan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Indikator Kinerja dan Target Kinerja Dinas KUKMPP Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja | Target Kinerja |
|----|---|----------------|
| 1 | Pertumbuhan volume usaha koperasi | 1,5% |
| 2 | Pertumbuhan omset usaha UMKM | 10% |
| 3 | Koefisien variasi harga antar waktu | ≤ 5% |
| 4 | Pertumbuhan omset usaha produk unggulan | 6% |
| 5 | Pertumbuhan produksi IKM | 3% |
| 6 | Nilai AKIP Dinas KUKMPP | BB |

4.2 Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif, Sumber Dana

Secara rinci program, kegiatan, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif serta sumber dana kegiatan pada tahun 2024 tampak pada tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.

Tabel 4.2
Rancangan Akhir Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif, dan Sumber Dana
Tahun 2024 dan Praperkiraan Maju Tahun 2025
Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2025 | |
|--|---|---|----------------------------|-------------------|---|----------------|---|---------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KUKMPP | | NILAI AKIP DINAS KUKMPP | | BB | | | | A | |
| 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | 96.5 % | 5.230.000.000 | | | 96.5 % | 6.262.000.000 |
| | | NILAI EVALUASI AKIP DINAS KUKMPP | | BB | | | | BB | |
| 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | | 94,5 % | 68.000.000 | | | 94,5 % | 73.000.000 |
| <i>2.17.01.2.01.0001</i> | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | <i>Kantor Dinas KUKMPP</i> | <i>2 Dokumen</i> | <i>35.000.000</i> | <i>DAU</i> | <i>1. Dokumen Renja 2. Dokumen Perubahan Renja</i> | <i>2 Dokumen</i> | <i>40.000.000</i> |
| <i>2.17.01.2.01.0002</i> | <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i> | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i> | <i>Kantor Dinas KUKMPP</i> | <i>2 Dokumen</i> | <i>9.000.000</i> | <i>DAU</i> | <i>1. RKA Pergeseran / Perubahan 2024 2. RKA 2025</i> | <i>2 Dokumen</i> | <i>9.000.000</i> |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2025 | |
|---------------------|---|---|---------------------------|--------------------|---|----------------|---|---------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.17.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 2 Dokumen | 9.000.000 | DAU | 1. DPA 2025 2. DPA Pergeseran / Perubahan 2024 | 2 Dokumen | 9.000.000 |
| 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 3 Laporan | 7.000.000 | DAU | 1. Laporan Tahunan 2. Laporan Kinerja 3. LPPK | 3 Laporan | 7.000.000 |
| 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kantor Dinas KUKMPP | 4 Laporan | 8.000.000 | | 1. Perjanjian Kinerja 2. Laporan evaluasi Renja 3. Register Resiko 4. LPPD/IKK | 4 Laporan | 8.000.000 |
| 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 92,5 % | 4.014.000.000 | | | 92,5 % | 4.039.000.000 |
| 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kantor Dinas KUKMPP | 518 Orang/Bulan | 3.850.000.000 | DAU | Gaji dan Tunjangan ASN | 518 Orang/Bulan | 3.870.000.000 |
| 2.17.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 12 Dokumen | 150.000.000 | DAU | Honorarium pengelola keuangan | 12 Dokumen | 155.000.000 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2025 | |
|-------------------|---|--|---------------------|-------------------|---|----------------|--|---------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 1 Laporan | 7.000.000 | DAU | 1. Laporan keuangan akhir tahun anaudit 2. Laporan keuangan akhir tahun audited | 1 Laporan | 7.000.000 |
| 2.17.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 1 Laporan | 7.000.000 | DAU | 1. Laporan keuangan semesteran 2. Laporan keuangan bulanan | 1 Laporan | 7.000.000 |
| 2.17.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar | | 95,5% | 7.000.000 | | | 95,5% | 7.000.000 |
| 2.17.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kantor Dinas KUKMPP | 4 Laporan | 7.000.000 | DAU | | 4 Laporan | 7.000.000 |
| 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 95,5% | 195.000.000 | | | 95,5% | 230.000.000 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2025 | |
|---------------------|--|--|---------------------|-------------------|---|----------------|--|---------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.17.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Kantor Dinas KUKMPP | 114 Paket | 125.000.000 | DAU | Pengadaan pakaian dinas dan olah raga 1. PDH 70 stel 2. Olah raga 70 stel 3. Sepatu gerak jalan 40 pasang | 114 Paket | 150.000.000 |
| 2.17.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kantor Dinas KUKMPP | 5 Orang | 70.000.000 | | Diklat pegawai/fungsional sesuai tupoksi | 5 Orang | 80.000.000 |
| 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 95,5 % | 324.000.000 | | | 95,5 % | 335.000.000 |
| 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 1 Paket | 13.000.000 | DAU | Penyediaan peralatan listrik | 1 Paket | 15.000.000 |
| 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 1 Paket | 48.000.000 | DAU | Penyediaan bahan keperluan kantor : 1. Bahan/alat kebersihan 2. ATK dan peralatan kantor 3. Makanan dan minuman | 1 Paket | 50.000.000 |
| 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 1 Paket | 13.000.000 | DAU | Cetak dan penggandaan | 1 Paket | 15.000.000 |
| 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Menyesuaikan | 60 Laporan | 250.000.000 | DAU | Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah | 60 Laporan | 255.000.000 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2025 | |
|-------------------|--|--|---------------------|-------------------|---|----------------|---|---------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah | | 77% | 155.000.000 | | | 77% | 1.100.000.000 |
| 2.17.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 1 Unit | 0,00 | | | 1 Unit | 450.000.000 |
| 2.17.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 1 Unit | 0,00 | | | 1 Unit | 500.000.000 |
| 2.17.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 30 Unit | 50.000.000 | | Pengadaan mebel : 1. Meja 20 unit 2. Kursi 60 unit | 30 Unit | 40.000.000 |
| 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 4 Unit | 80.000.000 | DAU | Pengadaan peralatan dan mesin : 1. Laptop 3 unit 2. Sound system 1 set 3. Infocus 2 unit 4. Printer 4 unit 5. Dispenser 8 unit 6. Mesin pembuat kopi 1 unit | 4 Unit | 80.000.000 |
| 2.17.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 3 Unit | 25.000.000 | | Pengadaan AC 5 unit | 3 Unit | 30.000.000 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2025 | |
|-------------------|---|---|---------------------------|-------------------|---|----------------|--|---------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 91% | 307.000.000 | | | 91% | 312.000.000 |
| 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kantor Dinas KUKMPP | 12 Laporan | 2.000.000 | DAU | Jasa pengiriman paket | 12 Laporan | 2.000.000 |
| 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 12 Laporan | 145.000.000,00 | DAU | Listrik, air, telpon dan internet | 12 Laporan | 150.000.000,00 |
| 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kantor Dinas KUKMPP | 12 Laporan | 160.000.000,00 | DAU | Tenaga kontrak 30 orang | 12 Laporan | 160.000.000,00 |
| 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 62 % | 160.000.000,00 | | | 62% | 166.000.000,00 |
| 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kantor Dinas KUKMPP | 20 Unit | 150.000.000,00 | DAU | 1. Pemeliharaan kendaraan dinas 2. Pembayaran pajak kendaraan dinas | 20 Unit | 155.000.000,00 |
| 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kantor Dinas KUKMPP | 15 Unit | 10.000.000,00 | DAU | 1. Pemeliharaan computer/laptop 2. Pemeliharaan AC 3. Pemeliharaan mesin lainnya | 15 Unit | 11.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2025 | |
|--|--|--|-------------------------------|--------------------------|---|----------------|---|---------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM | | | | 1.070.000.000,00 | | | | 1.215.000.000,00 |
| SASARAN : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PELAKU KOPERASI DAN UMKM | | PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI | | 1,5% | | | | 1,5% | |
| | | PERTUMBUHAN OMSET UMKM | | 10% | | | | 10% | |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI | PERSENTASE KOPERASI BERSERTIFIKAT NIK | | 22 % | 100.000.000,00 | | | 22% | 110.000.000,00 |
| 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Koperasi RAT | | 22 % | 100.000.000,00 | | | 22% | 110.000.000,00 |
| 2.17.03.2.01.0004 | <i>Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i> | <i>Kabupaten Merangin</i> | <i>60 Unit Usaha</i> | <i>100.000.000,00</i> | <i>DAU</i> | <i>1. Pemeriksaan/Audit koperasi 30 unit 2. Pembinaan/pengawasan koperasi 60 unit 3. Penyelesaian pembubaran koperasi 199 unit 4. Study tiru koperasi</i> | <i>50 Unit Usaha</i> | <i>110.000.000,00</i> |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | PERSENTASE KSP/USP-KOPERASI BERPREDIKAT SEHAT | | 5% | 70.000.000,00 | | | 5% | 80.000.000,00 |
| 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kepatuhan KSP/USP-Koperasi | | 13% | 70.000.000,00 | | | 13% | 80.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2025 | |
|-------------------|--|--|---------------------------|----------------------|---|----------------|--|---------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.17.04.2.01.0001 | <i>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i> | <i>Kabupaten Merangin</i> | <i>60 Unit Usaha</i> | <i>70.000.000,00</i> | <i>DAU</i> | <i>Pelaksanaan penilaian KSP/USP Koperasi 60 unit</i> | <i>30 Unit Usaha</i> | <i>80.000.000,00</i> |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | PERSENTASE PENGURUS MEMILIKI PEMAHAMAN BAIK DALAM MANAJEMEN KOPERASI | | 17% | 100.000.000,00 | | | 17% | 120.000.000,00 |
| 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rata-Rata Tingkat Pemahaman Peserta Terhadap Materi Pelatihan Koperasi | | 75% | 100.000.000,00 | | | 75% | 120.000.000,00 |
| 2.17.05.2.01.0001 | <i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i> | <i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i> | <i>Kec. Bangko</i> | <i>90 Orang</i> | <i>100.000.000,00</i> | <i>DAU</i> | <i>1. Pelatihan koperasi 90 orang 2. Uji kompetensi 30 orang</i> | <i>30 Orang</i> | <i>120.000.000,00</i> |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Pertumbuhan modal koperasi | | 1.50 % | 100.000.000,00 | | | 1.50 % | 105.000.000,00 |
| 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang memanfaatkan fasilitas permodalan/pembiayaan pemerintah (KUR/LPDB) | | 30 % | 100.000.000,00 | | | 30 % | 105.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2025 | |
|-------------------|--|---|---------------|-------------------|---|----------------|---|---------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | 20 Unit Usaha | 100.000.000,00 | | 1. Fasilitasi permodalan koperasi (LPDB/KUR) 2. Pelaksanaan Hari Koperasi (Harkop) | 20 Unit Usaha | 105.000.000,00 |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | PERTUMBUHAN UNIT USAHA UMKM | | 1,8% | 200.000.000,00 | | | 1,8% | 250.000.000,00 |
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase UMKM yang dibina | | 9,5% | 200.000.000,00 | | | 9,5% | 250.000.000,00 |
| 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | Kab. Merangin | 425 Unit Usaha | 100.000.000 | DAU | 1. Fasilitasi penerbitan NIB 300 unit usaha 2. Fasilitasi SHAT bagi UMKM 3. Fasilitasi permodalan UMKM 5 unit | 600 Unit Usaha | 125.000.000 |
| 2.17.07.2.01.015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | Kab. Merangin | 60 orang | 100.000.000 | DAU | Pelatihan kewirausahaan sebanyak 60 orang | 100 orang | 125.000.000 |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Pertumbuhan Omzet UMKM yang ikut program PLUT | | 10 % | 500.000.000,00 | | | 10 % | 550.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2025 | |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---|----------------|--|---------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Persentase UMKM yang ikut program PLUT | | 0,33 % | 500.000.000,00 | | | 0,33 % | 550.000.000,00 |
| 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | | 20 Unit Usaha | 500.000.000,00 | | 1. Inkubasi UMKM melalui PLUT 80 unit 2. Pembangunan pagar gedung PLUT 3. Pembangunan lapangan parkir gedung PLUT 4. Pengadaan sound system gedung PLUT 5. Pengadaan peralatan pendingin gedung PLUT | 20 Unit Usaha | 550.000.000,00 |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | 4.155.000.000,00 | | | | 4.945.000.000,00 |
| SASARAN : STABILITAS HARGA | | KOEFISIEN VARIASI HARGA ANTAR WAKTU | | ≤5% | | | | | |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | PERSENTASE KETERSEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | 44 % | 3.150.000.000,00 | | | 44% | 3.370.000.000,00 |
| 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Bangunan Pasar Dalam Kondisi Baik | | 28% | 3.000.000.000,00 | | | 28% | 3.200.000.000,00 |
| 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | Kabupaten Merangin | 2 Unit | 3.000.000.000,00 | DAU DAK | 1. Revitalisasi pasar type A dan type B 2. Penyusunan perencanaan pasar strategis 3. Revitalisasi pasar rakyat mengakomodir usulan masyarakat dan Pokir Dewan | 2 Unit | 3.200.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2025 | |
|-------------------|--|---|-----------------------|-------------------|---|----------------|---|---------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Persentase Pasar di Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan Yang Pengelolaannya Baik | | 8% | 150.000.000,00 | | | 8% | 170.000.000,00 |
| 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kabupaten Merangin | 12 Dokumen | 150.000.000,00 | DAU | Pengelolaan Pasar Rakyat strategis di Kec. Bangko, Sungai Manau, Tabir dan Pamenang | 12 Dokumen | 170.000.000,00 |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | RATA-RATA KENAIKAN HARGA BARANG POKOK | | ≤5% | 240.000.000,00 | | | ≤5% | 265.000.000,00 |
| 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/kota | Jumlah jenis barang kebutuhan barang pokok dan barang penting yang dikendalikan harga dan stoknya | | 16% | 190.000.000,00 | | | 16% | 210.000.000,00 |
| 3.30.04.2.02.0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Kabupaten Merangin | 12 Laporan | 120.000.000,00 | DAU | 1. Pemantauan harga di Pasar Baru dan Pasar Bawah setiap hari kerja 2. Pemantauan stok barang di pasar strategis di Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan 3. Update informasi harga setiap hari kerja 4. Pengadaan peralatan untuk publikasi informasi harga - Vidio Tron / TV 1 unit - Laptop 1 unit | 12 Laporan | 130.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2025 | |
|-------------------|---|---|--------------------|-------------------|---|----------------|---|---------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Kabupaten Merangin | 5 Laporan | 70.000.000,00 | DAU | | 5 Laporan | 80.000.000,00 |
| 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Tepat Sasaran | | 90% | 50.000.000,00 | | | 90% | 55.000.000,00 |
| 3.30.04.2.03.0003 | Pengawasan, Penyaluran, dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Kabupaten Merangin | 12 Laporan | 50.000.000,00 | DAU | Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di 24 Kecamatan | 12 Laporan | 55.000.000,00 |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARISASI DAN PERLIDUNGAN KONSUMEN | PERSENTASE WAJIB TERA TERTIB UKUR | | 8,33% | 170.000.000,00 | | | 8,33% | 680.000.000,00 |
| 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Persentase Pasar Rakyat di Ibu Kota Kabupaten dan di Ibu Kota Kecamatan Tertib Ukur | | 24% | 170.000.000,00 | | | 24% | 680.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2025 | |
|---|---|---|-----------------------|--------------------|---|----------------|---|---------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | Kabupaten Merangin | 1500 Unit | 170.000.000,00 | DAU | 1. Pelaksanaan alat tera/tera ulang 1500 alat UTTP 2. Pelaksanaan pengawasab alat UTTP dan BDKT 3. Pengadaan peralatan Metrologi - Dehumidifier 1 unit - Meja tahan getar 2 unit - Tongkat duga 1 unit - Bejana ukur 20 L 1 unit - Timbangan elektronik 150 Kg, Timbangan Daya Bava E 0,1 - Anak timbangan M2 1 Kg s/d 10 Kg set unit - Bejana Ukur 200 Liter - Komparator Sidang | 1000 Unit | 680.000.000,00 |
| SASARAN : MENINGKATNYA OMSET USAHA PRODUK UNGGULAN | | PERTUMBUHAN OMSET USAHA PRODUK UNGGULAN DAERAH | | 6% | | | | | |
| 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | JUMLAH PELAKU UMKM UNGGULAN YANG MEMILIKI KEMAMPUAN EKSPOR | | 3 UMKM | 120.000.000,00 | | | 3 UMKM | 130.000.000,00 |
| 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Yang Dibina Untuk Ekspor | | 5 Pelaku Usaha | 120.000.000,00 | | | 5 Pelaku Usaha | 130.000.000,00 |
| 3.30.05.2.01.0005 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi | | 10 Pelaku Usaha | 120.000.000,00 | | Mengirim pelaku usaha produk unggulan untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan ekspor 10 orang | 10 Pelaku Usaha | 130.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2025 | |
|-------------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|---|----------------|---|---------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | PERTUMBUHAN NILAI TRANSAKSI KOMODITI/PRODUK UNGGULAN | | 10% | 475.000.000,00 | | | 10% | 500.000.000,00 |
| 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Persentase komoditi/produk unggulan yang dipromosikan | | 50% | 475.000.000,00 | | | 50% | 500.000.000,00 |
| 3.30.07.2.01.0005 | <i>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i> | <i>Menyesuaikan</i> | 30 UMKM | 475.000.000,00 | DAU | 1. Mengikuti promosi dan eskpo produk unggulan daerah pada Pameran Jambi Ekspo, Merangin Ekspo, MTQ Tingkat Provinsi, Kriya Nusantara/Dekranasda, APKASI, Inacraf dan pameran temporer/insidental. 2. Pengadaan peralatan untuk pameran berupa TV dan peralatannya 1 set | 30 UMKM | 500.000.000,00 |
| 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | 3.500.000.000,00 | | | | 4.175.000.000,00 |
| SASARAN : MENINGKATNYA PRODUKSI IKM | | PERTUMBUHAN NILAI PRODUKSI IKM | | 3% | | | | | |
| 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | PERTUMBUHAN UNIT USAHA INDUSTRI | | 10% | 3.350.000.000,00 | | | 10% | 4.000.000.000,00 |
| 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Persentase Calon Wirausaha Binaan Yang Tumbuh Menjadi Wirausaha Baru | | 50% | 3.350.000.000,00 | | | 50% | 4.000.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2025 | |
|-------------------|--|---|--------------------|-------------------|---|----------------|---|---------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.31.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | Kabupaten Merangin | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | DAU | Penyusunan dokumen RPIK Kab. Merangin | 1 Dokumen | 100.000.000,00 |
| 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Kabupaten Merangin | 3 Dokumen | 350.000.000,00 | DAU | 1. Pelatihan batik 20 peserta 2. Pelatihan bubuk ekstrak bahan baku kunyit dan jahe 20 peserta 3. Pelatihan desain anyaman 20 peserta 4. Pelatihan aneka olahan dari nanas 20 orang 5. Pelatihan aneka olahan dari jahe 20 orang | 3 Dokumen | 400.000.000,00 |
| 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Kabupaten Merangin | 5 Dokumen | 2.000.000.000,00 | DAU | Pengadaan sarana industri/peralatan produksi a. Mesin sablon kemasan beras b. Mesin dan peralatan Sentra IKM Sungai Misang c. Pengadaan neon box merek sentra IKM Sungai Misang d. Mengakomodir usulan masyarakat e. Mengakomodir pokir dewan f. Pengadaan peralatan pengolahan nanas | 5 Dokumen | 2.500.000.000,00 |
| 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Kabupaten Merangin | 5 Dokumen | 750.000.000,00 | DAK DAU | 1. Fasilitasi dan dukungan kegiatan Dekranasda 2. Pembinaan IKM melalui temu usaha dan jaringan industry sebanyak 70 unit 3. Pembangunan/Revitalisasi Sentra IKM (DAK) mendukung DTW Geopark | 5 Dokumen | 1.000.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2025 | |
|-------------------|--|--|--------------------|-------------------|---|----------------|---|---------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE IKM YANG SUDAH SERTIFIKASI (HKI/HALAL/PIRT/TK DN/SNI) | | 11 % | 100.000.000,00 | | | 11 % | 100.000.000,00 |
| 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase IKM Penghasil Produk Unggulan Yang Difasilitasi Sertifikasinya | | 35% | 100.000.000,00 | | | 35% | 120.000.000,00 |
| 3.31.03.2.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | Kabupaten Merangin | 15 Dokumen | 100.000.000,00 | DAU | 1. Fasilitasi penerbita NIB sebanyak 50 IKM 2. Fasilitasi sertifikasi produk IKM (HKI/Halal/TKDN/PIRT dan yang sejenis) 30 IKM | 15 Dokumen | 120.000.000,00 |

| No | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2025 | |
|-------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|---|----------------|--|---------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | <i>PERSENTASE IKM YANG MASUK KEDALAM SIINas</i> | | 1% | 50.000.000,00 | | | 1% | 55.000.000,00 |
| 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Usaha IKM Penghasil Produk Unggulan Yang Masuk SIINas</i> | | 12% | 50.000.000,00 | | | 12% | 55.000.000,00 |
| 3.31.04.2.01.0001 | <i>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i> | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i> | <i>Kabupaten Merangin</i> | <i>10 Dokumen</i> | <i>50.000.000,00</i> | | <i>Pengumpulan, pengolahan dan input data IKM ke SIINas sebanyak 75 unit</i> | <i>10 Dokumen</i> | <i>55.000.000,00</i> |

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan penting

Renja adalah dokumen perencanaan OPD yang disusun dengan mempedomani Renstra OPD dan mengacu pada Ranwal RKPD, diantaranya memuat rancangan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Oleh karenanya, dokumen Renja ini akan menjadi kerangka dasar dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan Dinas KUKMPP dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2024.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk optimalisasi dan keterpaduan pencapaian hasil terhadap program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan lima tahunan yakni, Renstra Dinas KUKMPP tahun 2024–2026, maka pada tahun 2024 dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 13.955.000.000

Apabila ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten Merangin tidak mencukupi dalam pengalokasian anggaran program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renja Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin, maka akan dilakukan pengkajian ulang terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Sejalan tersusunnya Renja yang memuat target-target kinerja program dan kegiatan, diperlukan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai bidang urusan, melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya.
- b. Mengingat banyak bidang urusan yang dikelola, perlu dilakukan penambahan aparatur, agar rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
- c. Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* terhadap seluruh pegawai untuk peningkatan kinerja pegawai.

- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran.

Demikian Renja Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin tahun 2024 ini disusun, semoga memberi manfaat bagi kita semua. Amin

PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MERANGIN



MUHAMMAD AMIR TAMSIL, SH. ME

Pembina Tk. I

NIP. 19630405 198403 1 003